



KABUPATEN BADUNG

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP. (0361) 9009421

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke-hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dan kondisi kesehatan di Kabupaten Badung sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 tahun.

Selain itu Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung ini juga berfungsi sebagai indikator yang menjembatani antara kenyataan dan harapan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung. Hal ini sesuai dengan kebijakan

pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Kabupaten Badung sebagai salah satu bagian dari Indonesia juga berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Untuk itu penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung ini juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung.

Kami menyadari dalam penyusunan draft Rencana Strategis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga draf Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan, khususnya di Kabupaten Badung.

Mangupura, September 2016

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,

dr. I Gede Putra Suteja

Pembina Utama Muda

NIP. 19600407 198710 1 001

Daftar Isi

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.....	37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.....	67
4.2 Indikator dan Sasaran Strategis.....	80

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	95
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	106
BAB VII	PENUTUP	111

Daftar Tabel

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	19
Tabel 2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2013-2015.....	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	33
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	36
Tabel 4.1.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	69
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	80
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	103
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	104

Daftar Grafik

	HAL
Grafik 2.1 Umur Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015....	23
Grafik 2.2 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015	25
Grafik 2.3 Penyebab Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2015	25
Grafik 2.4 Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2010 -2015	26
Grafik 2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015	28
Grafik 2.6 Distribusi Jumlah Kasus dan kematian Akibat HIV dan AIDS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2015	30
Grafik 2.7 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015	31
Grafik 2.8 Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015	32



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5754/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 wajib menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI 80351
TELP. (0361) 9009419 – 9009421, FAX. (0361) 9009419
Website <http://dikesbadungkab>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan;
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

15. Keputusan Bupati Badung Nomor 2019/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 September 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis perangkat daerah. Sedangkan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan di masing-masing perangkat daerah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan program-program pembangunan.

Adapun fungsi rencana strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu:

- a. Sebagai dasar pedoman rencana pembangunan lima tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung terutama dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), serta RKA Dinas kesehatan.
- b. Sebagai instrumen untuk mengevaluasi proses perencanaan penganggaran setiap tahun dan lima tahunan.

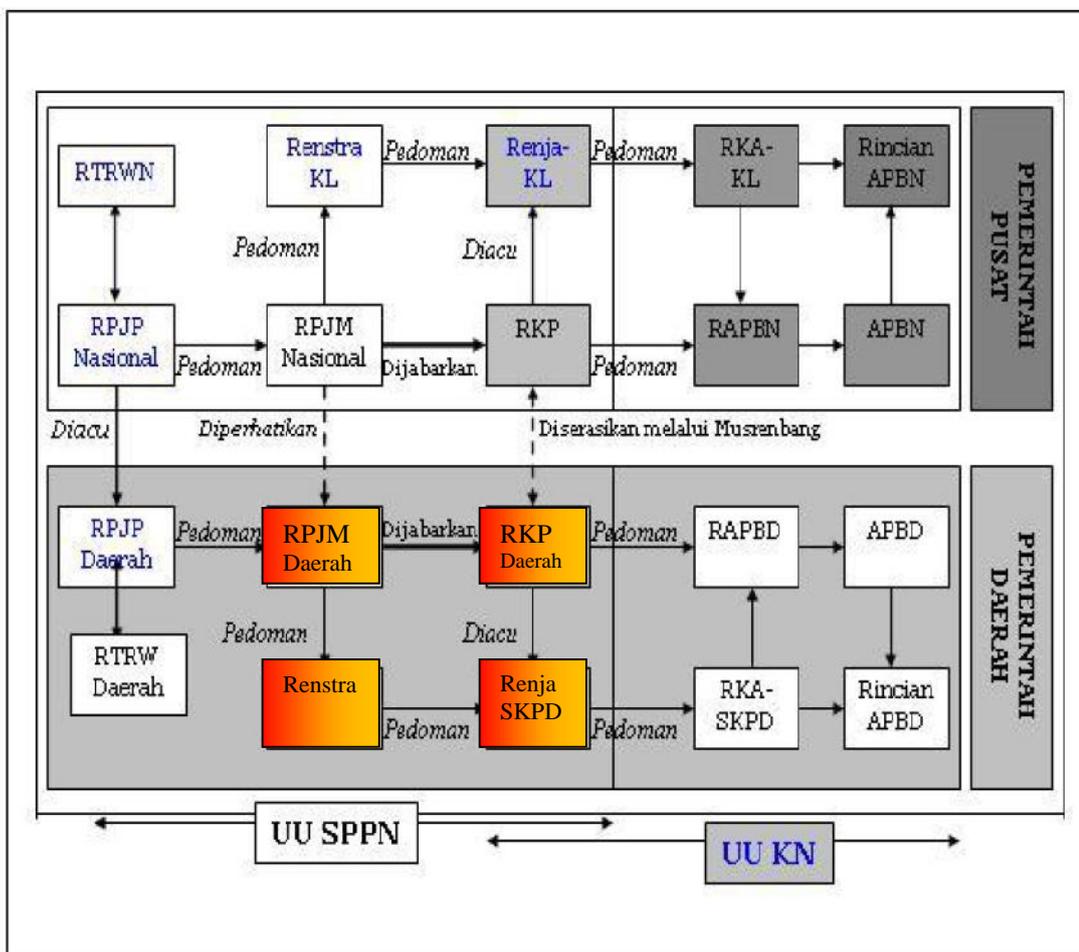
Dalam proses penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 yang mencakup :

- a. Tahapan Persiapan penyusunan renstra SKPD melalui penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra SKPD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

- b. Tahapan Penyusunan rancangan melalui Perumusan rancangan Renstra PD dan Penyajian rancangan Renstra PD.
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. Penetapan Renstra PD oleh kepala PD atas rekomendasi kepala Bappeda dan pengesahan Bupati.

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan terjalin keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta rencana kerja Dinas Kesehatan. Adapun Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 1. 1
Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pada proses perencanaan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (**RPJPD**) yang dilanjutkan dengan dokumen RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD ini, tim RPJMD menyusun rancangan awal RPJMD dan untuk menyusun rancangan akhir RPJMD dibutuhkan dokumen internal berupa Rencana Strategis perangkat daerah. Dokumen perencanaan ini disusun dalam rangka sinergisitas pembangunan daerah. Dalam penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD karena Renstra perangkat daerah merupakan input bagi penyusunan dokumen RPJMD. Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja perangkat daerah (Renja) yang merupakan dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu sebagai pedoman operasionalisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan kesehatan yang meliputi :

Program generik :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasan Idiil Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional

Landasan operasional peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

- a. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
- b. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;
- d. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2016 -2021 adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN.
2. Menyediakan acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

4. Memudahkan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan selama lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mencakup tujuh Bab yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan disertai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta penutup. Masing-masing Bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan dengan Renja Dinas Kesehatan. Juga dibahas berkaitan dengan maksud dan tujuan serta landasan peraturan baik dari aspek perencanaan dan kebijakan nasional, daerah dan kebijakan sektoral serta maksud dan tujuan dibuatnya rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 – 2021.

- Bab 2** : Gambaran Pelayanan OPD memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab 3** : Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab 4** : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai tujuan pembangunan lima tahunan yang ingin dicapai serta sasaran strategis pembangunan kesehatan yang harus dicapai setiap tahunnya. Penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan pembangunan kesehatan.
- Bab 5** : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap dan jumlah dana yang dibutuhkan.
- Bab 6** : Indikator Kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab 7** : Penutup merujuk simpulan atas substansi dokumen Renstra

BAB II

Gambaran

Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

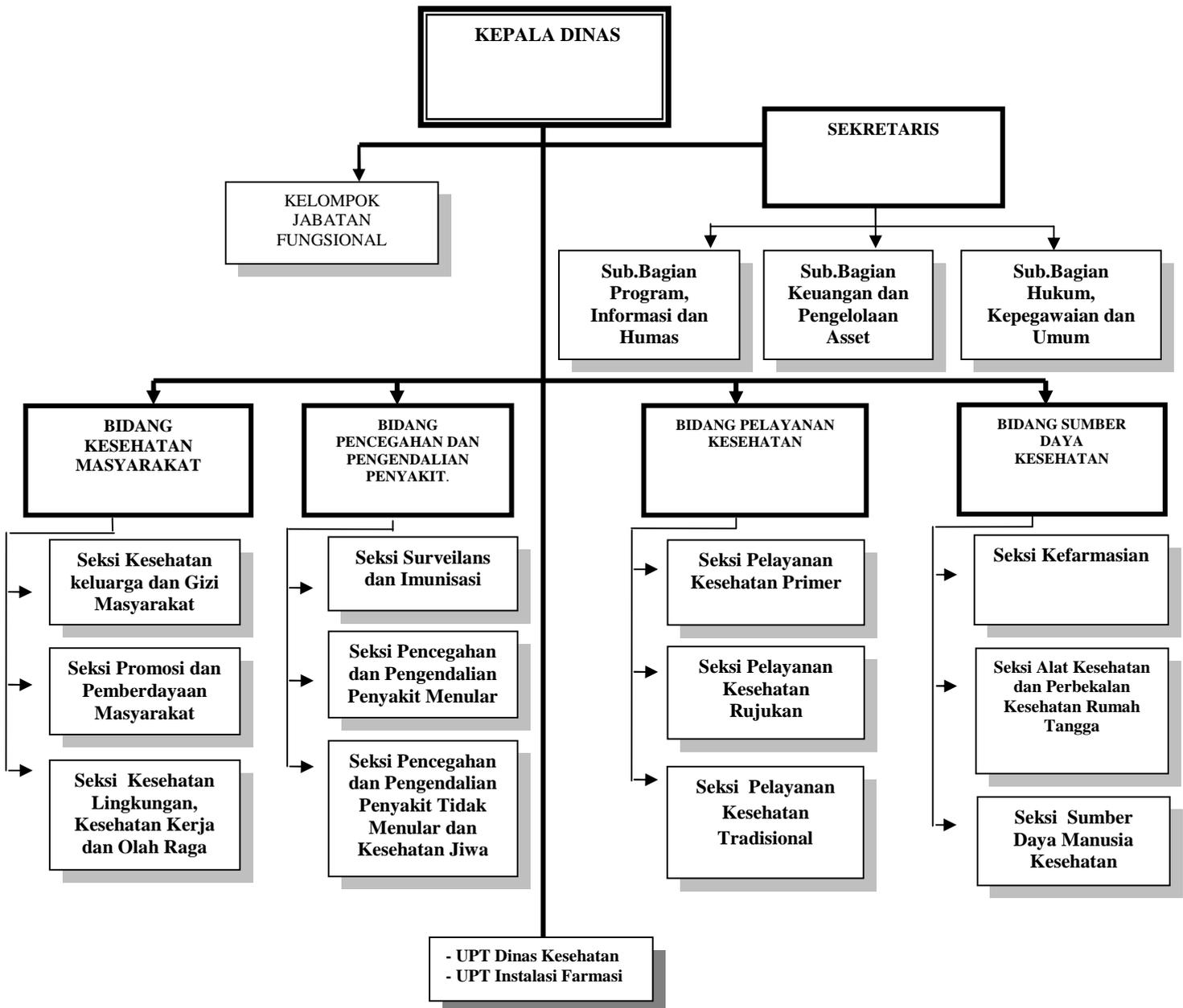
2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
 - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 - a) Seksi Kefarmasian;
 - b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a) Puskesmas;
 - b) Instalasi Farmasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;
10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatannya. Sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Badung terdiri dari:

a. Ketenagaan

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Badung sebanyak 717 orang dengan perincian di dinas kesehatan sebanyak 88 orang dan UPT (puskesmas) sebanyak 629 orang. Distribusi tenaga kesehatan dengan status PNS, non PNS dan tenaga administrasi umum dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
 Profil Sumber Daya Manusia
 Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016

NO	Jenis Ketenagaan	Dinas Kesehatan	UPT Dinas Kesehatan														Total
			Pet ang I	Pet ang II	Ab ian s I	Ab ian s li	Ab ians III	Ab ians IV	Me ngw i I	Me ngw i II	Men gwi III	Kut a Utr	Ku ta I	Ku ta II	Ku ta Slt	Gud ang F	
A.	Tenaga PNS	51	34	28	52	34	31	19	60	43	38	43	45	27	47	4	556
1	Dokter Umum	5	7	5	6	5	5	4	7	5	4	6	9	2	7	0	77
2	Dokter Gigi	2	3	1	2	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2	0	36
3	Perawat	4	7	10	24	9	8	3	15	11	8	10	10	8	12	0	139
4	Bidan	4	11	7	12	11	7	4	24	17	16	16	10	7	18	0	164
5	Apoteker	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
6	Kesehatan Masyarakat	27	0	1	1	0	2	1	3	1	1	2	2	2	1	0	44
7	Sanitarian	5	2	2	1	2	4	1	1	1	2	1	2	2	1	0	27
8	Gizi	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
9	Fisioterapi																0
10	Perawat Gigi	0	1	1	3	3	1	2	3	3	2	3	3	1	4	0	30
11	SMF & D3 Farmasi	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2	18
12	Analisis kesehatan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	6
13	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B.	Tenaga PTT	0	6	2	8	7	5	9	9	8	7	4	3	1	2	0	71
1	Dokter PTT (daerah)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Dokter Gigi PTT (daerah)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Bidan (PTT Pusat)		6	2	6	7	5	8	9	8	7	4	3	1	2	0	65
c.	Tenaga Umum	37	7	2	6	3	4	2	8	4	5	5	2	1	4	3	93
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2	SMP	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5
3	SLTA	12	2	2	5	0	4	1	3	2	3	2	1	0	0	2	39
4	SLTA/Pekarya Kes	3	4	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	2	0	18
5	SPPM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
6	D3 Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	S1 Umum	18	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	25
	Total Tenaga	88	47	32	66	44	40	30	77	55	50	52	50	29	53	7	717

b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung untuk mendukung jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti berikut:

Tabel 2.2
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Fasilitas				
	a. Puskesmas				
	1. Induk	12	13	13	13
	2. Pembantu	54	54	54	54
	3. Keliling	13	13	13	13
	b. Rumah Sakit Pemerintah				
	1. Tipe a	-	-	-	-
	2. Tipe b	-	1	1	1
	3. Tipe c	1	-	1	1
	4. Tipe d	-	-	-	-
	c. Rumah Sakit Umum Swasta				
	1. Tipe a	-	-	-	-
	2. Tipe b	-	-	-	-
	3. Tipe c	2	4	4	5
	4. Tipe d	-	-	-	-
	d. Rumah Sakit Khusus	1	1	1	2
	e. Klinik/Praktek Dokter	5/128	42/1.167	42/499	29/499
	f. Posyandu	572	573	573	575
2	Jumlah Industri Farmasi				
	a. Farmasi	-	-	-	-
	b. Narkotika	-	-	-	-
	c. Produk Obat Tradisional	-	-	-	-
	d. Instalasi Farmasi Kesehatan	1	1	1	1
3	Pedagang Kesehatan				
	a. Pedagang besar farmasi	2	2	2	7
	b. Pedagang besar narkotika	-	-	-	-
	c. Apotek	76	189	207	207
	d. Toko obat berijin	7	42	45	46

Berdasarkan tabel 2.2. diatas fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung terdiri dari 13 unit, puskesmas pembantu 54

unit dan puskesmas keliling (Pusling) sebanyak 13 unit. fasilitas kesehatan lainnya seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 575 unit yang tersebar sampai ke desa – desa dan banjar. Dari tahun ke tahun kuantitas sarana dan prasarana ini terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, terdapat 1 unit rumah sakit umum daerah yakni RSUD Kabupaten Badung, 1 unit Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dan 5 unit rumah sakit swasta yakni Rumah Sakit Graha Asih, Rumah Sakit Surya Husada, Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan dan Rumah Sakit BIMC Kuta dan Rumah Sakit BIMC Nusa Dua. Sedangkan untuk praktek dokter swasta sebanyak 499 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.3.1. Umur Harapan Hidup

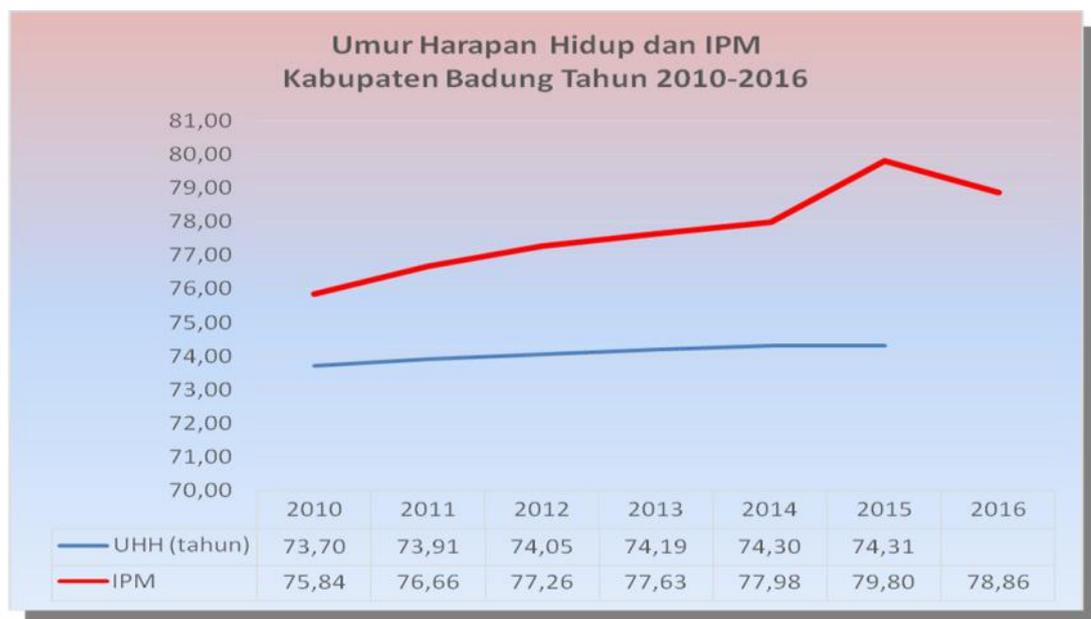
Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kabupaten Badung terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 sebesar 75,84 dan tahun 2016 sebesar 79,80. Keberhasilan tersebut salah satu ditunjang dari keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, dengan indikator keberhasilannya adalah Umur Harapan Hidup.

Umur harapan hidup berarti seberapa lama orang hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, berarti kita mengukur derajat kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor, dan secara garis besar disebabkan faktor kesehatan dan faktor non kesehatan. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat menentukan

derajat kesehatan masyarakat. Faktor lain diluar kesehatan yang tak kalah penting berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya (Depkes, 2010). Umur Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Badung seperti grafik berikut :

Grafik 2.1
Umur Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2010-2016



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor, dan secara garis besar dipengaruhi faktor kesehatan dan faktor non kesehatan. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Faktor lain diluar kesehatan yang tak kalah penting berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya (Depkes, 2010). Pada bagian ini derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung akan digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan beberapa penyakit yang ada di Kabupaten Badung.

2.3.2. Mortalitas

Angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu dikenal dengan mortalitas (Depkes, 2010). Mortalitas selain dapat menggambarkan keadaan dan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dapat juga digunakan sebagai dasar perencanaan di bidang kesehatan. Tingkat kematian secara umum sangat berhubungan erat dengan tingkat kesakitan.

Sebab-sebab kematian ada yang dapat diketahui secara langsung dan ada pula yang tidak langsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas dan morbiditas adalah sosial ekonomi, pendapatan perkapita, pendidikan, perilaku hidup sehat, lingkungan, upaya kesehatan dan fertilitas.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

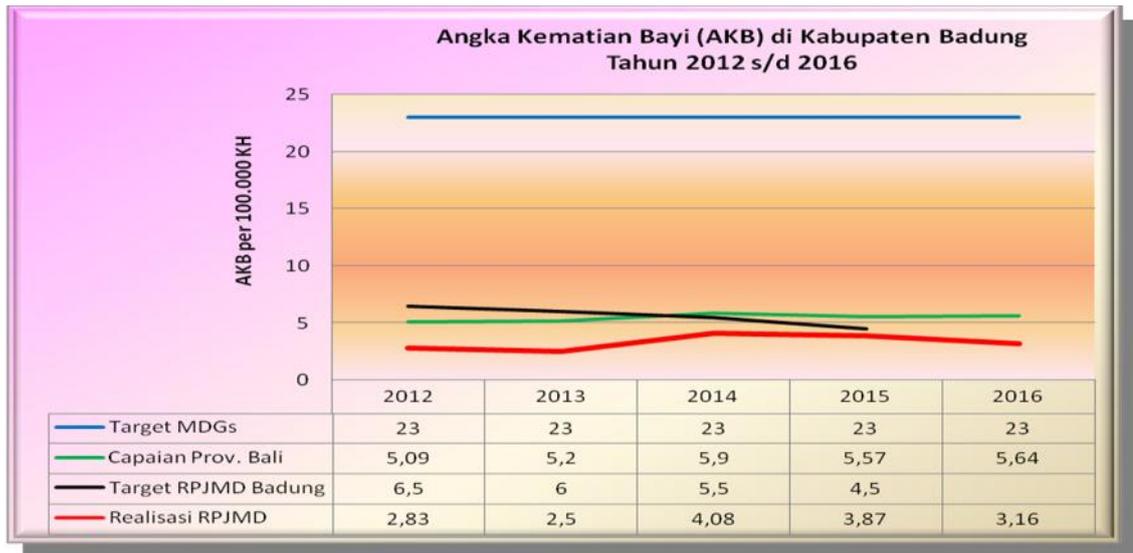
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung cenderung menurun setiap tahunnya. Hasil pencapaian indikator AKB tahun 2015 sebesar 3,87 per 1.000 kelahiran hidup lebih rendah dibandingkan tahun 2014 adalah 4,09 per 1.000 kelahiran hidup. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan telah mencapai target di bawah 4,5 per 1.000 Kelahiran Hidup dan telah

mencapai target di bawah angka Nasional sebesar 48 per 1.000 KH dan target MDGs sebesar 23 per 1.000 KH.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik 2.2. di bawah ini.

Grafik 2.2

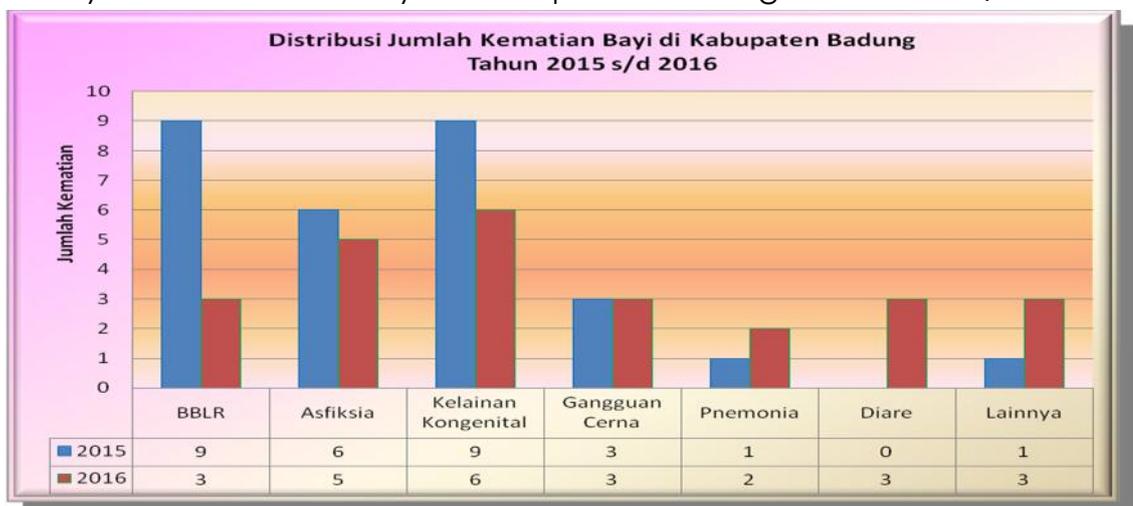
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2016



Adapun penyebab kematian bayi pada tahun 2015 s/d 2016 sebanyak 23 kasus oleh beberapa faktor yaitu: (1) BBLR, (2) Asfiksia, (3) Kelainan Kongenital, (4) Gangguan Cerna, (5) Pnemonia, (6) Diare (7) Lainnya, selengkapnya seperti pada grafik 2.3 berikut:

Grafik 2.3

Penyebab Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2015 s/d 2016



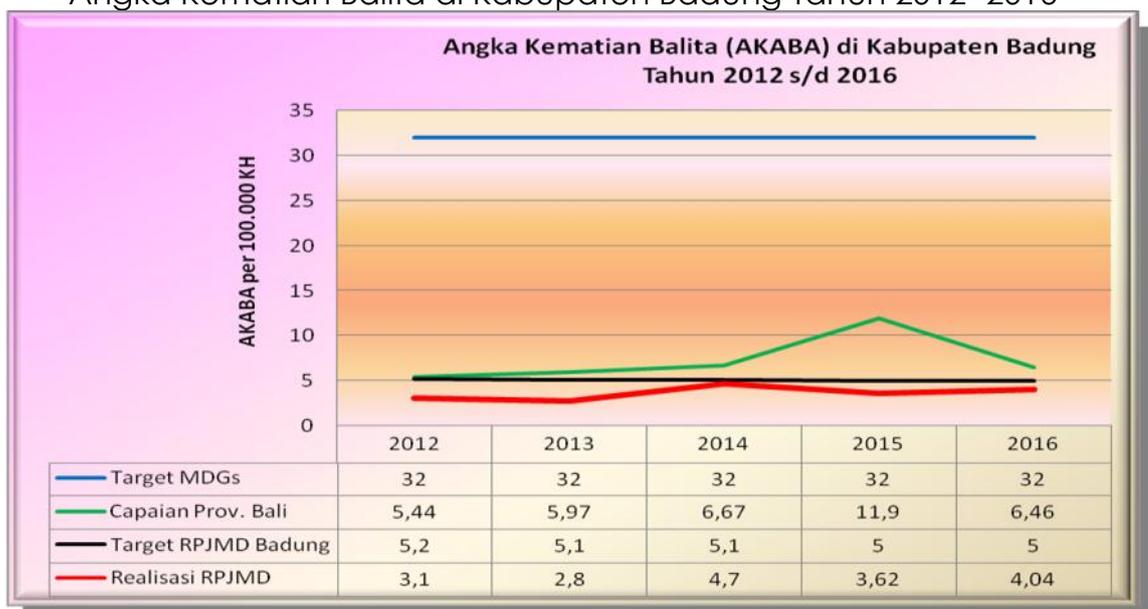
Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun dan dinyatakan per 1.000 balita. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung memiliki kecenderungan adanya peningkatan angka kematian balita. Hasil capaian angka kematian balita di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 3,62 per 1.000 Kelahiran Hidup lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 4,71 per 1.000 Kelahiran Hidup. Hasil capaian angka kematian balita (AKABA) telah mencapai target RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 5 per 1000 balita. Pencapaian angka kematian balita ini masih dibawah target Nasional sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup dan target MDG's 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.4

Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2012 -2016



Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga

Jumlah kematian balita di Kabupaten Badung tahun 2015 sebanyak 32 orang, disebabkan oleh komplikasi beberapa penyakit. Penyebab turunnya angka kematian balita (AKABA) di Kabupaten Badung oleh karena baiknya gizi balita, rendahnya faktor risiko yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian gizi anak cukup baik serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

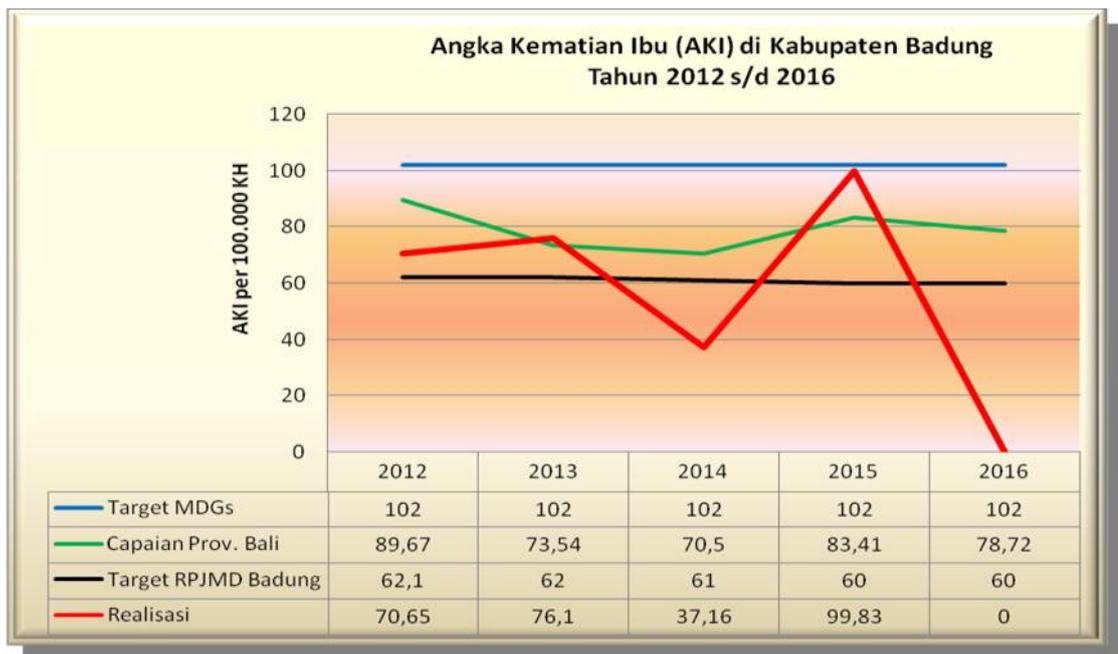
Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Indikator AKI dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Hasil capaian Angka Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 99,83 per 100.000 kelahiran hidup lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 37,16 per 100.000 kelahiran hidup, berarti melampaui dari target RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2014. Hasil pencapaian AKI di Kabupaten

Badung telah mencapai target yang ditetapkan secara Nasional sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup serta target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2015 seperti pada grafik 1.5 berikut:

Grafik 2.5

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016



2.3.3. Morbiditas

Angka kesakitan baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit disebut morbiditas. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu dan berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

a. TB Paru

Penyakit TB Paru merupakan penyakit *re-emerging* yang masih terus ditemukan di Provinsi Bali. Secara nasional TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. TB Paru merupakan penyakit yang masih tinggi angka kejadiannya bahkan merupakan yang tertinggi ketiga di dunia.

MDGs menetapkan penyakit TB Paru sebagai salah satu target penyakit yang harus diturunkan selain HIV AIDS dan Malaria. Dalam program penanggulangan penyakit TB. Paru dikenal tipe penyakit TB. Paru diantaranya kasus baru dan kasus lama/kambuh.

Kasus baru adalah Penderita yang belum pernah diobati dengan obat anti tuberkulosis atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bln (30 dosis harian) sedangkan kasus lama/kambuh adalah Penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan TB dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.

Angka kesembuhan TB BTA+ tahun 2015 sebesar 87.82% dari 197 kasus TBC BTA+ yang diobati, sedangkan tahun 2014 sebesar 85,40% dari seluruh kasus TBC BTA+ yang diobati, dengan jumlah kasus TBC BTA+ yang diobati sebanyak 137 kasus.

b. Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP).

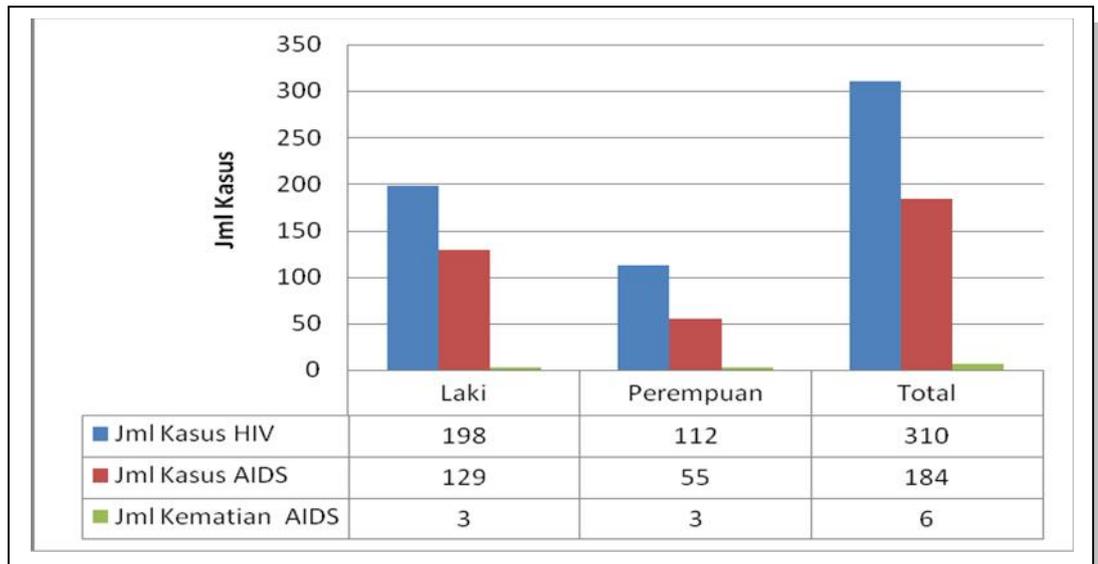
Jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Badung tahun 2016 sebanyak 494 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 6 orang. Adapun rinciannya meliputi jumlah kasus HIV sebanyak 310 kasus dan jumlah kasus AIDS sebanyak 184 kasus.

Jumlah kasus HIV dan AIDS menurut kelompok jenis kelamin menunjukkan bahwa kasus terbanyak pada jenis kelamin laki-laki.

Distribusi jumlah kasus HIV dan kasus AIDS serta kematian Akibat AIDS menurut jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.6

Distribusi Jumlah Kasus dan kematian Akibat HIV dan AIDS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2016



Sumber : Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (Data diolah)

c. Pneumonia

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi akut yang menyerang pernapasan mulai dari hidung hingga alveoli. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, virus atau kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi rentan yang terserang pneumonia adalah anak umur < 2 tahun.

Jumlah kasus pneumonia pada balita yang dilaporkan berobat di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 sebanyak 120 kasus atau cakupan penemuan sebesar 5.39%, sedangkan tahun 2014 sebanyak 67 kasus.

Upaya penanganan kasus pneumonia sesuai program ISPA yaitu pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) serta

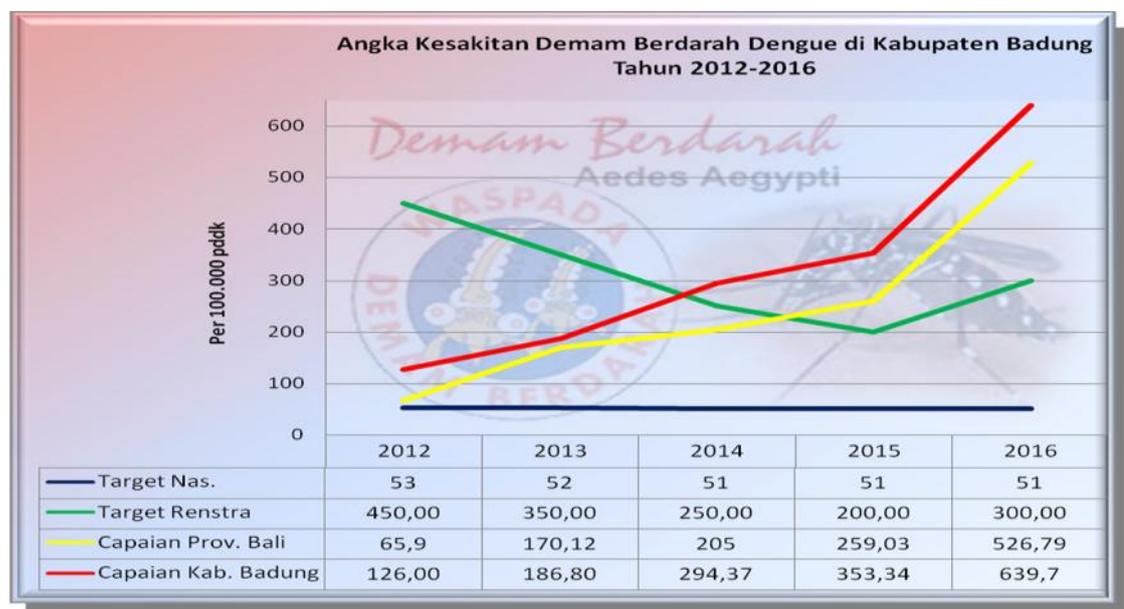
pelaksanaan manajemen terpadu bayi muda (MTBM). Selain upaya tersebut juga dilakukan dengan cara menghilangkan faktor penyebab itu sendiri melalui peningkatan status gizi bayi/balita, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan sanitasi lingkungan tempat tinggal serta peningkatan status imunisasi bayi/balita.

d. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 353.34 per 100.000 penduduk sedangkan tahun 2014 sebesar 294,37 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan demam berdarah dengue di Kabupaten Badung Tahun 2015 lebih tinggi atau melampaui target renstra dinas Kesehatan sebesar 200 per 100.000 penduduk serta target nasional sebesar 50 per 100.000 penduduk. Adapun angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Badung tahun 2012 s/d 2016 seperti grafik 1.7 berikut :

Grafik 2.7

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
di Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2016



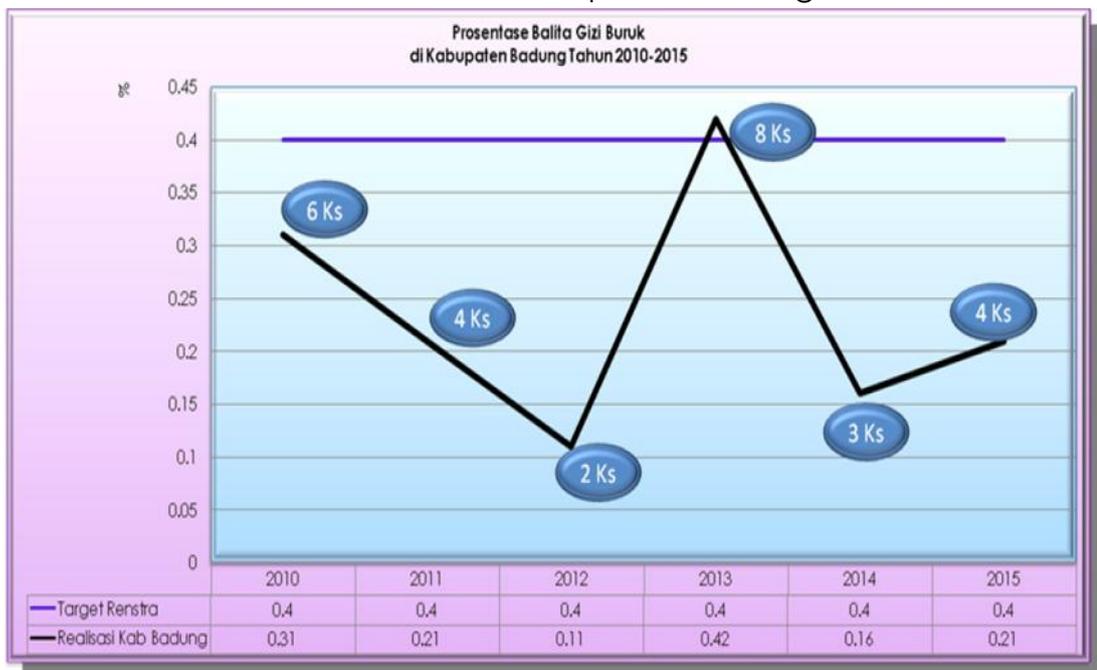
2.3.4. Status Gizi

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor).

Hasil capaian balita gizi buruk di Kabupaten Badung tahun 2010 sampai 2015 cenderung berfluktuatif dan merupakan jumlah kasus yang minimal. Hasil capaian persentase gizi buruk 2010 sampai 2012 cenderung turun, dan meningkat tahun 2013 sebesar 8 kasus (0,42%) dan selanjutnya turun sampai pada tahun 2015 sebanyak 4 kasus (0,20%). Hasil capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,4%. Hasil capaian cakupan gizi buruk di Kabupaten Badung Seperti grafik 2.8 berikut :

Grafik 2.8

Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015



2.3.4. Pelayanan Kesehatan

Gambaran upaya pelayanan kesehatan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target			Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		SPM	IKK	Indikator MDGs & Lain	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	95%			88.6	90.2	91.8	93.4	95	96.14	90.3	93.28	95.3	87.36	108.5	100.1	101.6	102.0	92.0
2	Cakupan Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80%			51.2	58.4	65.6	72.8	80	60.34	54.9	80.62	72.99	44.14	117.9	94.0	122.9	100.3	55.2
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%			95.8	96.6	97.4	98	98	99.09	92	95.7	99.72	95.52	103.4	95.2	98.3	101.8	97.5
4	Cakupan pelayanan nifas	90%			95	96	97	98	99	97.77	91	71.33	95.66	93.79	102.9	94.8	73.5	97.6	94.7
5	Cakupan neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80%			47.2	55.4	63.6	71.8	80	63.2	55.9	80.83	79.36	39.19	133.9	100.9	127.1	110.5	49.0
6	Cakupan kunjungan bayi	90%			100	100	100	100	100	105.87	104.3	96.77	93.86	106.49	105.9	104.3	96.8	93.9	106.5
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8	Cakupan Pelayanan Anak Balita dan pra sekolah	90%			74.8	78.6	82.4	86.2	90	81.26	84.8	90.29	92.89	71.1	108.6	107.9	109.6	107.8	79.0
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	90%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%			100	100	100	100	100	99.58	99.4	99.7	100	100	99.6	99.4	99.7	100.0	100.0
12	Cakupan peserta KB Aktif	70%			75.2	76.4	77.6	78.8	80	77.63	78.9	77.9	85.53	74.77	103.2	103.3	100.4	108.5	93.5

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target			Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		SPM	IKK	Indikator MDGs & Lain	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.2	100.0	100.0	100.0	100.0	97.2
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%			100	100	100	100	100	100	100	25.9	25.91	100	100.0	100.0	25.9	25.9	100.0
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%			100	100	100	100	100	100	100	91	100	100	100.0	100.0	91.0	100.0	100.0
16	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	90%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.1	100.0	100.0	100.0	100.0	98.1
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
19	Prosentase Rumah Sehat		80%		85.5	86	87	87	87	81.86	85.6	90	90.6	67.79	95.7	99.5	103.4	104.1	77.9
20	Prosentase Tempat-Tempat Umum sehat		80%		90	90	90	90	90	79.8	89.8	79.8	89.8	96.92	88.7	99.8	88.7	99.8	107.7
21	Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		65%		50	55	60	65	70	56.03	56.03	56.03	56.03	67.86	112.1	101.9	93.4	86.2	96.9
22	Prosentase Posyandu Purnama dan Mandiri		40%		95	95	95	95	95	88.77	88.77	88.77	88.77	94.75	93.4	93.4	93.4	93.4	99.7
23	Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO				0	0	15.38	30	45			15.38	30	46.15			100.0	100.0	102.6
24	Persentase Perijinan praktek tenaga kesehatan			100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25	Rata-rata waktu penyelesaian perijinan Nakes			14 Hr					14					8.4					60.0

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target			Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		SPM	IKK	Indikator MDGs & Lain	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
26	Indeks IKM terhadap pelayanan kesehatan			80%					80					80.58					100.7
27	Prosentase penduduk yg memanfaatkan Puskesmas			15%	15	15	15	15	15	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	571.3	571.3	571.3	571.3	571.3
28	Angka kesakitan DBD per 100.000 pddk		51	51	500	450	350	250	200	158.48	126	186.8	287.2	353.34	31.7	28.0	53.4	114.9	176.7
29	Angka kesakitan malaria per 1000 pddk (API)		<1	<1	1	1	1	1	1	0.02	0.005	0.01	0	0.01	2.0	0.5	1.0	-	1.0
30	Angka Kematian Ibu (100.000 KH)		102	102	62.12	62.1	62	61	60	56.7	70.65	76.1	37.16	99.83	91.3	113.8	122.7	60.9	166.4
31	Angka kelangsungan hidup bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup		23	23	6.5	6	5.5	4.5	4.5	4.93	2.83	2.5	4.08	3.87	75.8	47.2	45.5	90.7	86.0
32	Angka Kematian Balita (AKABA)		32	32	5.2	5.2	5.1	5.1	5	5.2	3.1	2.8	4.7	3.62	100.0	59.6	54.9	92.2	72.4
33	Angka Umur harapan hidup		72	72	72	72	72	72	72	73.91	74.05	74.19	74.3	74.5	102.7	102.8	103.0	103.2	103.5
34	Persentase balita gizi buruk		<15 %	15	15	10	5	1	1	0.13	0.11	0.015	0.16	0.2	0.9	1.1	0.3	16.0	20.0

2.3.5. Pendanaan Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung	47,282,056,459	54,450,680,667	56,135,468,187	64,583,382,870	72,263,022,269	38,399,105,401	43,703,302,228	51,035,757,391	57,780,934,146	66,724,794,946	81.21	80.26	90.92	89.47	92.34	4,996,193,162	5,665,137,909
Pegawai	47,282,056,459	54,450,680,667	56,135,468,187	64,583,382,870	72,263,022,269	38,399,105,401	43,703,302,228	51,035,757,391	57,780,934,146	66,724,794,946	81.21	80.26	90.92	89.47	92.34	4,996,193,162	5,665,137,909
Belanja langsung	33,714,906,724	80,449,849,236	112,018,959,062	136,946,812,568	85,034,798,356	16,571,838,252	42,766,970,346	62,914,892,385	71,510,103,496	65,648,155,734	49.15	53.16	56.16	52.22	77.20	10,263,978,326	9,815,263,496
a. Belanja Pegawai	18,402,847,362	50,669,654,126	68,469,832,031	82,978,256,259	1,292,960,500	2,567,217,800	3,276,158,000	4,899,583,200	3,211,212,200	1,203,351,800	13.95	6.47	7.16	3.87	93.07	(3,421,977,372)	(272,773,200)
b. Barang dan Jasa	2,728,549,800	3,663,940,300	5,307,921,500	3,325,727,000	56,320,303,342	11,584,391,152	22,403,105,144	36,050,289,340.10	43,756,044,490.00	42,892,812,618	424.56	611.45	679.18	1315.68	76.16	10,718,350,708	6,261,684,293
c. Modal	12,583,509,562	26,116,254,810	38,241,205,531	50,642,829,309	27,421,534,514	2,420,229,300	17,087,707,202	21,965,019,845	24,542,846,806	21,551,991,316	19.23	65.43	57.44	48.46	78.60	2,967,604,990	3,826,352,403
Total Belanja Daerah	80,996,963,183	134,900,529,903	168,154,427,249	201,530,195,438	157,297,820,625	54,970,943,653	86,470,272,574	113,950,649,776	129,291,037,642	132,372,950,680	67.87	64.10	67.77	64.15	84.15	15,260,171,488	15,480,401,405

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4.1. Tantangan

a. Jaminan Kesehatan Nasional

Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah memberlakukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk memberikan pelayanan kesehatan, Dinas kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan harus lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasarana di Puskesmas. Kualitas dan kuantitas SDM juga perlu diperhatikan sehingga pelayanan yang diberikan lebih bermutu dan, rasio yang proporsional antara jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan terpenuhi.

b. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2030

Adanya keberlanjutan program MDG's menjadi SDG's sehingga perlu keterpaduan program/kegiatan karena bukan hanya tugas dinas kesehatan semata tetapi butuh keterlibatan banyak pihak dalam upaya percepatan pencapaian target SDG's.

c. Puskesmas terakreditasi

Pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas telah terakreditasi. Dengan rencana tersebut diharapkan puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Tantangan yang

dihadapi Dinas Kesehatan adalah bagaimana mempercepat proses pengusulan Puskesmas untuk memperoleh izin untuk mengelola keuangannya serta aspek-aspek akreditasi seperti aspek upaya kesehatan masyarakat, aspek upaya kesehatan perorangan dan aspek manajemen pelayanan puskesmas.

d. Puskesmas ISO

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/2004 dijelaskan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan kabupaten, maka Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dalam menghadapi tuntutan pelayanan bagi pasien maka dinas kesehatan Kabupaten harus terus berusaha untuk dapat meningkatkan pelayanan guna memuaskan pasien dan membangun kesetiiaannya, salah satu dengan menjadikan Puskesmas ISO.

Sertifikat ISO seakan sudah menjadi kebutuhan bagi institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan publik. Sebenarnya fungsi utama eksistensi puskesmas sebagai unit *public service* adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko kesakitan di tengah masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan sertifikat ISO berhubungan dengan fungsi kuratif Puskesmas. Bila fungsi kuratif berhubungan

dengan upaya kesehatan perorangan (UKP), maka fungsi promotif dan preventif berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Jadi, relevansi sertifikat ISO lebih ditujukan pada Puskesmas plus yakni puskesmas yang menjalankan fungsi kuratif berupa rawat inap dan rawat jalan secara simultan.

e. Pengendalian Bahan Berbahaya

Pengendalian Bahan Berbahaya memerlukan pendampingan dan penguatan regulasi yang masih kurang pada produk local dan import makanan, kosmetika dan obat-obatan, maupun obat terlarang. semakin bertambahnya industri makanan dan minuman, sehingga apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan makanan dan minuman yang tersedia tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin dll, serta prosedur pembuatan dan penyajian makanan untuk diperdagangkan perlu disosialisasikan dan dipantau lebih baik, khususnya pada tempat produksi, dan tempat penjualan di sekolah, institusi dan tempat-tempat umum, termasuk pemantauan bagi pengedaran NAPZA.

f. Pengembangan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana Puskesmas yang ada di Kabupaten Badung masih kurang. Berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Badung tahun 2015 maka jumlah puskesmas di Kabupaten Badung seharusnya 20 Puskesmas. Demikian juga dengan bertambahnya jumlah sarana kesehatan maka dibutuhkan peningkatan prasarana kesehatan, peralatan dan sumber daya manusia serta lainnya. Peningkatan jumlah Puskesmas menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Badung.

g. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Sanitarian, Gizi, Farmasi, SKM, dan Elektromedik masih kurang dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada sebanyak 13 lokasi. Begitu pula dengan banyaknya program di Puskesmas tenaga kesehatan Perawat dan Bidan sering mengelola program rangkap di Puskesmas yang berdampak pada beratnya pencapaian kinerja program serta kurang efisien dan efektifnya pengelolaan, pencatatan dan pelaporan program di Puskesmas. Peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung.

h. Pengembangan Puskesmas PONED

Kebutuhan akan pendekatan layanan persalinan kepada masyarakat untuk mencegah keterlambatan persalinan dan kematian Ibu memerlukan Puskesmas PONED. Pengembangan Puskesmas PONED menjadi Tantangan Pemerintah Kabupaten Badung.

i. Penganggaran dan Penyerapan Anggaran Efisien dan Efektif

Dari tabel Anggaran dan realisasi Pendanaan APBD Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 yang disampaikan sebelum Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dapat dilihat Anggaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung meningkat setiap tahun, dengan rata-rata Penyerapan Anggaran dari tahun 2011-2015 adalah 69,6%.

- j. Standarisasi Mutu Pelayanan di Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta Regulasi yang telah ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik, telah diperbarui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 perlu diterapkan dengan baik bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Sehubungan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kerjasama dari Klinik yang dapat memberikan layanan yang bermutu. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan yang baik di Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung. Selain itu sarana kesehatan swasta yang bermutu menjadi tantangan untuk dapat memberi kontribusi bagi kurangnya sarana dan prasarana layanan kesehatan Pemerintah.
- k. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas dan Sarana Kesehatan Swasta
- Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas dengan Sarana Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas yang lebih baik menjadi tantangan untuk mendapatkan data layanan kesehatan yang terpadu dan menggambarkan tingkat kesehatan yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena selama ini data kewilayahan dari sarana kesehatan swasta belum semua dapat dilaporkan oleh Puskesmas.

2.4.2. Peluang

Disamping tantangan yang akan dihadapi juga terdapat peluang yang menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk pembangunan kesehatan, hal ini sesuai dengan upaya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana salah satu indikatornya adalah kesehatan.
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga memungkinkan adanya peningkatan pembiayaan kesehatan. Anggaran untuk sektor kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari segi jumlah maupun prosentase dari total anggaran pembangunan belanja daerah (APBD). Alokasi anggaran kesehatan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 132,372,950,680,- dengan realisasi sebesar 84,14%. Anggaran kesehatan Kabupaten Badung
- c. Adanya kepedulian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan terutama bagi masyarakat miskin
- d. Adanya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis web (open source) dan kemajuan teknologi gadget yang semakin canggih sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan .
- e. Adanya infrastruktur yang memadai sehingga menunjang pelayanan kesehatan
- f. Adanya globalisasi akan memberi peluang bagi tenaga kesehatan untuk berkesempatan bekerja di luar negeri

- g. Adanya pembiayaan kesehatan untuk semua penduduk Kabupaten Badung yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten berupa BPJS dan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS).
- h. Tersedianya lembaga pendidikan negeri dan swasta yang menciptakan tenaga kesehatan yang profesional.
- i. Adanya kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap kesehatan.

BAB III

Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung antara lain:

a. Sumber Daya Manusia bidang kesehatan

- Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum optimal.
- Kurangnya tenaga administrasi serta staf non teknis.

b. Pembiayaan Kesehatan

- Adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang diharapkan dapat mencakup semua penduduk Badung yang dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelola keuangan dan standar akuntansi pemerintah (SAP) sehingga dapat bermanfaat secara efektif dan efisien.

c. Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan

- Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai sarana puskesmas pembantu.

- Berdasarkan ratio jumlah penduduk, Jumlah puskesmas masih kurang terutama di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan.
- Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan RI dan WHO, Kabupaten masih kekurangan tempat tidur rumah sakit, sehingga perlu pendirian rumah sakit umum pemerintah.
- Masih ada beberapa sarana kesehatan yang rusak (rusak ringan dan rusak berat) sehingga perlu rehabilitasi.
- Belum optimalnya jumlah dan jenis peralatan medis dan non medis

d. Upaya Pelayanan Kesehatan

- Angka kematian ibu masih berfluktuatif dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 99,83 per 100.000 Kelahiran Hidup.
- Belum ada puskesmas yang terakreditasi
- Masih tingginya angka Kesakitan oleh karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM
- Rendahnya masyarakat mengkomsumsi garam yodium (GAYO)
- Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif
- Belum optimalnya PHBS terutama ASI Eksklusif
- Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
- Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi harapan masyarakat
- Pelayanan kesehatan promotif dan preventif belum optimal
- Beberapa masyarakat kelompok rentan terhadap penyakit belum mendapat pelayanan kesehatan secara optimal

d. Manajemen Kesehatan

- Sistem informasi kesehatan belum optimal dimana pelaporan tidak tepat waktu, tidak teratur serta kurang terpadu
- Belum optimalnya koordinasi program dan pelaporan antara rumah sakit pemerintah, swasta serta dinas kesehatan
- Pengelolaan asset dan barang milik daerah belum optimal

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

- a. Perubahan iklim/musim dan peningkatan kunjungan wisatawan akan berdampak pada new emergency dan timbulnya KLB/wabah penyakit.
- b. Besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas sehingga berpotensi terhadap meningkatnya kasus HIV-AIDS.
- c. Tingginya kontak dengan dunia luar yang memiliki risiko lebih tinggi tertular penyakit
- d. Mobilisasi penduduk cukup tinggi.
- e. Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit belum sepenuhnya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021, sebagai berikut : **“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.**
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah mengemban misi yang ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, **kesehatan** dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, khususnya untuk melaksanakan misi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Badung.

Berdasarkan misi keempat maka tujuan yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas, dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Sasaran strategis yang ingin dicapai setiap tahun untuk mewujudkan tujuan yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator sasaran strategis diukur melalui :

- a. Persentase kekurangan gizi pada anak balita
- b. Angka kematian balita (AKABA)
- c. Angka kematian Ibu Melahirkan (AKI)
- d. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Program Prioritas Bupati dan wakil Bupati terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung dalam lima tahun mendatang, mengacu pada program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) meliputi :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama : Pembangunan POSKESDES dan POLINDES di masing-masing Desa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua Kecamatan se-Provinsi Bali.
3. Peningkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit

Tanpa Kelas, dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap dan membuat regulasi tentang penambahan Dokter Spesialis di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD.
6. Pengadaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke Desa-Desa (pelayanan kegawat daruratan).

Beberapa permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung meliputi :

- a. Belum adanya lokasi lahan untuk pendirian rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas dan puskesmas pembantu.
- b. Keterbatasan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas rawat inap
- c. Belum ada bentuk kerjasama (MOU) untuk penempatan dokter spesialis di puskesmas rawat inap.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, maka Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi untuk mencapai Nawa Cita pada poin 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact atau outcome*). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
- b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
- c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
- d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

- b. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
 - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
 - b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
 - c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.

- a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
 - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
 - c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
 - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
 - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
 - c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
 - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
 - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran strategis serta indikator untuk mengukur keberhasilannya maka peluang untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu:
 - a. Adanya pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin
 - b. Puskesmas sebagian besar telah ISO
 - c. Ketersediaan vaksin untuk imunisasi pelayanan kesehatan dasar
 - d. Adanya dukungan pembiayaan melalui dana CSR seperti cukai rokok
 - e. Adanya aplikasi SIKDA Generik berbasis webSedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu:
 - a. Angka kematian ibu masih tinggi dan capaiannya berfluktuatif

- b. Kesulitan dalam pengukuran indikator tujuan yaitu beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dan indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan serta beberapa indikator sasaran lainnya.
- c. Adanya perubahan kebijakan mengenai struktur organisasi

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah : **“BALI MANDARA” (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)**. Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Bali tersebut maka Visi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2013-2018 adalah **“Bali Sehat Menuju Bali Mandara”**.

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2013-2018 yang meliputi:

- a. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali.
- b. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya Kesehatan
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Untuk mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Bali Menetapkan tujuan yaitu meningkatkan derajat Kesehatan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan.**

- a. Menurunkan jumlah angka kematian ibu (AKI).
- b. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan.

2. **Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita.**

- a. Menurunkan Jumlah Angka Kematian Bayi dan Balita.
- b. Menurunkan Jumlah Angka Kematian Balita (AKABA).

- c. Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar.
- d. Jumlah Balita yang mendapatkan SDIDTK.
- e. Persentase cakupan KF sesuai standar.

3. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat.

- a. Menurunkan persentase Bumil KEK.
- b. Menurunkan Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk.
- c. Persentase Bumil KEK yang mendapatkan PMT.
- d. Persentase Balita yang ditimbang (D/S).
- e. Persentase Bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif.
- f. Meningkatkan persentase desa siaga aktif.
- g. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk dana UKBM.
- h. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

4. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular.

- a. Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular.
- b. Menurunkan Angka Kematian Penyakit Menular.
- c. Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
- d. Persentase kab/kota sehat.
- e. Persentase Balita, anak sekolah, WUS dan Bumil yang mendapat imunisasi.
- f. Persentase KLB yang tertangani < 18 jam.
- g. Persentase penanganan kasus sesuai SOP.
- h. Meningkatkan Surveilans Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- i. Persentase Sinyal Kewaspadaan yang direspon.

5. Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

- a. Terlaksananya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.
- b. Jumlah desa yang memiliki posbindu PTM aktif.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Fasilitas Kesehatan.

- a. Meningkatkan Persentase Faskes yang memenuhi Standar Pelayanan.
- b. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar.
- c. Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi.
- d. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang melaksanakan pelayanan sesuai standar.
- e. Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi.
- f. Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar.
- g. Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi.
- h. Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik.
- i. Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota.
- j. Persentase diklat yang terakreditasi.
- k. Melaksanakan pendidikan Kebidanan sesuai dengan kompetensinya.
- l. Fasilitasi kegiatan kediklatan di Fasyankes di 9 kab/kota.
- m. Advokasi kegiatan kediklatan di Fasyankes di 9 kab/kota.
- n. Persentase Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
- o. Revitalisasi sistem pelayanan laboratorium.
- p. Meningkatkan persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Faskes.
- q. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP.

- r. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL.
- s. Meningkatkan sistem pengendalian mutu pelayanan laboratorium.
- t. Revitalisasi sistem pelayanan JKBM.
- u. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.
- v. Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasyankes.
- w. Melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran strategis serta indikator untuk mengukur keberhasilannya Dinas Kesehatan Provinsi Bali maka peluang untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu:

- a. Adanya pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin
- b. Puskesmas sebagian besar telah ISO
- c. Ketersediaan vaksin untuk imunisasi pelayanan kesehatan dasar
- d. Adanya dukungan pembiayaan melalui dana CSR seperti cukai rokok

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu:

- a. masih tinggi Angka kematian ibu dan capaiannya berfluktuatif
- b. Masih tingginya angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
- c. Belum optimalnya capaian cakupan ASI eksklusif dan garam beryodium
- d. Belum optimalnya memanfaatkan dana desa 10% untuk dana UKBM

- e. Masih rendahnya cakupan desa siaga aktif dengan strata purnama dan mandiri
- f. Belum adanya laboratorium Kabupaten serta masih kurangnya tenaga analis kesehatan
- g. Belum semua fasilitas kesehatan bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS
- h. Belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional;
- b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita;
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional;
- d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;

- e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
- f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan

partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

3.5. Penentuan Isu-Isu strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis maka akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dinas kesehatan yang ditinjau dari beberapa aspek, meliputi :

a. Gambaran Pelayanan PD

Pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan target SPM serta target Sustainable Development Goals (SDGs). Pencapaian target SPM dan SDGs tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleksitas, baik dari pemberi pelayanan kesehatan maupun dari penerima pelayanan kesehatan.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan kesehatan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu
- 2) Masih tingginya angka Kesakitan oleh karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM

- 3) Rendahnya masyarakat mengkonsumsi garam yodium (GAYO)
- 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif
- 5) Belum optimalnya PHBS terutama ASI Eksklusif
- 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
- 7) Kekurangan Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan (UU Nomor 36 tahun 2014)
- 8) Kurangnya tenaga administrasi di puskesmas
- 9) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan
- 10) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
- 11) Belum optimal ketersediaan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
- 12) Sistem informasi kesehatan belum optimal dimana pelaporan tidak tepat waktu, tidak teratur serta kurang terpadu
- 13) Belum optimalnya Pelaksanaan JKN
- 14) Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai sarana puskesmas pembantu.
- 15) Masih ada sarana kesehatan (pustu, BKIA dan Puskesmas) yang mengalami kerusakan

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan

Faktor-faktor pelayanan kesehatan yang mempengaruhi tercapainya sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian kesehatan diantaranya :

- 1) Adanya target sasaran jangka menengah dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai
- 2) Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

c. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Permasalahan-permasalahan Dinas Kesehatan dari implikasi penyelenggaraan penataan ruang (RTRW) di Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan
- 2) Berkembangnya kawasan perkotaan baru, dengan keberadaan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di kawasan Sempidi dan telah ditetapkannya kawasan perkotaan Mengwi sebagai Kawasan Ibukota Kabupaten Badung,
- 3) Belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan ruang wilayah perairan dan laut sesuai batas kewenangan 4 mil laut untuk Pemerintah Kabupaten, dan

- 4) Masuknya 5 wilayah kecamatan sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita yang membutuhkan koordinasi pembangunan lintas wilayah.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

- 1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Kesehatan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- 2) Implikasi terhadap indikasi program utama pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam rangka perwujudan rencana jenis program pelayanan kesehatan sesuai struktur ruang wilayah Kabupaten Badung
- 3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Kesehatan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

d. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan kabupaten Badung

Permasalahan yang kemungkinan dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung meliputi :

- 1) Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan terjadinya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ;
- 2) Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
- 3) Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk sehingga menimbulkan menurunnya ketersediaan air bersih dan air minum;
- 4) Menurunnya keanekaragaman hayati dan plasma nuffah;
- 5) Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun sehingga menimbulkan peningkatan terjadinya penyebaran penyakit sebagai akibat kepadatan penduduk meningkat serta pemukiman padat penduduk (daerah kumuh)
- 6) Meningkatnya penyebaran penyakit-penyakit baru sebagai akibat arus migrasi antar pulau maupun antar negara (pariwisata)

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan surveilans penyakit, pencegahan penyakit serta penanggulangan bencana
- 2) Peningkatan kualitas sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan
- 3) Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Dinas Kesehatan selama lima tahun kedepan yang ditinjau dari aspek gambaran pelayanan dinas kesehatan, sasaran jangka menengah kementerian kesehatan, implikasi RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, meliputi :

- 1) Mempercepat status kesehatan masyarakat (upaya-upaya kesehatan sesuai tahapan kehidupan (life cycle) secara berkesinambungan
- 2) Peningkatan status gizi masyarakat
- 3) Percepatan pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
- 4) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 5) optimalisasi kemandirian dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penguatan implemementasi Sistem Kesehatan Nasional untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya
- 7) Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dengan penekanan pada layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
- 8) Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
- 9) Penguatan manajemen dan sistem informasi
- 10)Peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan

BAB IV

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kab. Badung

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Penetapan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah memberikan kerangka kerja bagi pemangku kepentingan untuk menentukan secara spesifik proses dari penerjemahan peran dan fungsi organisasi dan bentuk pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran penting untuk menentukan fokus dan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan strategis perangkat daerah disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran perangkat daerah merupakan subjek dan objek perubahan yang akan diintervensi melalui berbagai tindakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Sasaran lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat sebagai pengaruh dari pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan pasal 272 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ayat 3 menyebutkan Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dirumuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan dengan dokumen perencanaan strategis tingkat Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJPN/D, RPJMN/D, Renstra K/L, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD,
Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
<p>I. RPJPN 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)</p>	<p>RPJMN 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015)</p>	<p>Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2021 (Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015)</p>
<p>Sasaran Pokok: Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera</p> <p>Prioritas RPJPN Tahap III (2015-2019) meliputi : untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat</p> <p>RPJP Kesehatan (Kepmenkes 375 tentang RPJP Bidang Kesehatan 2005-2025) Arah pengembangan upaya kesehatan, dari</p>	<p>9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Diantaranya prioritas ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <p>Sasaran Pokok : 5 sasaran pokok pembangunan Nasional 2015-2019. Sasaran Pokok ke 2 yaitu: Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Sasaran pokok untuk kesehatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya tanggap (<i>responsiveness</i>) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
<p>kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan. Prioritas tahap ke 3 RPJMN tahun 2015 s/d 2019 yaitu akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap</p>		
<p>II. RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 6 Tahun 2009)</p>	<p>RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014)</p>	<p>Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2013-2018</p>
<p>1. Terwujudnya Masyarakat Bali yang Unggul: 2. Lestarinya Kebudayaan Daerah Bali 3. Terwujudnya Keamanan Daerah dan Masyarakat Bali yang Berkeadilan serta Demokratis 4. Terwujudnya Masyarakat Bali yang Sejahtera 5. Terwujudnya Pembangunan Bali yang Lestari, Handal dan Merata</p>	<p>1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metakshu, dinamis, maju dan modern 1.1 Meningkatnya akses dan mutu pada layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.3 Meningkatnya IPTEK dan daya saing SDM 1.4 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan 1.5 Meningkatnya peran gender dalam pembangunan 1.6 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p>

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
	lembaga pendidikan ketenagakerjaan 1.7 Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat 1.8 Meningkatnya kecerdasan masyarakat berpolitik 1.9 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa 2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman 3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.	
III. Kabupaten Badung 2005-2025 (Perda Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab. Badung 2005-2025)	RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Perda Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021)	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2016 - 2021
Tujuan : Mewujudkan daerah Kabupaten Badung yang sejahtera sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Sasaran Pokok :	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan Tujuan :	Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi Luhur 2. Terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat 3. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar Hukum 5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis 6. Terwujudnya sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan Berkualitas 7. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas 	<p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat 3. Menurunnya angka kemiskinan 	

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2016-2021, tidak dilengkapi Visi dan misi, namun langsung menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Badung periode Tahun 2016–2021, yaitu :

Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.**
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah mengemban misi pokok yang ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, **kesehatan** dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan disamping misi-misi yang lain yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Dengan memperhatikan isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan dengan dokumen perencanaan strategis tingkat Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada periode Renstra 2016-2021:

“

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (**UHH**) dari 74,35 tahun menjadi 75 Tahun
2. Angka kematian ibu (**AKI**) dari 96.83 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.
3. Angka kematian balita (**AKABA**) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
4. Persentase Prevalensi kekurangan gizi (*under weight*) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%.
5. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**
- 2) **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**
- 3) **Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular**
- 4) **Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat**
- 5) **Meningkatnya status gizi masyarakat**
- 6) **Meningkatnya kualitas sanitasi dasar**
- 7) **Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses**
- 8) **Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan**

Berdasarkan rumusan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka ditetapkan peta sasaran strategi Dinas Kesehatan yang disusun dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Pertama, Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Ke dua, pelanggan (*customer*). Ke tiga, *internal business process*. Ke empat, *learning and growth*. Peta strategi

merupakan suatu *dashboard (panel instrument)* yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Adapun rincian peta strategis dari sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan metode *Balanced Scorecard (BSC)*, yaitu:

a. Perspektif *Pemangku Kepentingan (Stakeholders)*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder (pemangku kepentingan)* adalah *pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung*.

Perspektif paling atas ini merupakan sudut pandang *stakeholder* karena BSC dibangun dari studi pengukuran kinerja pada sektor bisnis. Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut : "apa yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*". Berdasarkan kelompok perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders*) maka dirumuskan sasaran strategis yaitu: **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**

b. Perspektif Pelanggan (*Customer*)

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer*. *Customer (pengguna*

layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif *customer* adalah perspektif yang berorientasi pada pelanggan karena merekalah pemakai produk/jasa yang dihasilkan organisasi. Dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut : “apa yang harus dicapai organisasi agar memenuhi keinginan *customer* atau apa yang diinginkan *customer* untuk dipenuhi organisasi”.

Berdasarkan kelompok perspektif Pelanggan (*Customer*) terdapat enam sasaran strategis yaitu :

- 1) **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**
- 2) **Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular**
- 3) **Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat**
- 4) **Meningkatnya status gizi masyarakat**
- 5) **Meningkatnya kualitas sanitasi dasar**

c. Perspektif *Internal business process*

Perspektif *internal business process* adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Perspektif ini menjelaskan proses bisnis yang dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Berdasarkan kelompok perspektif bisnis internal (*Internal business process*) terdapat dua sasaran strategis yaitu :
Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang

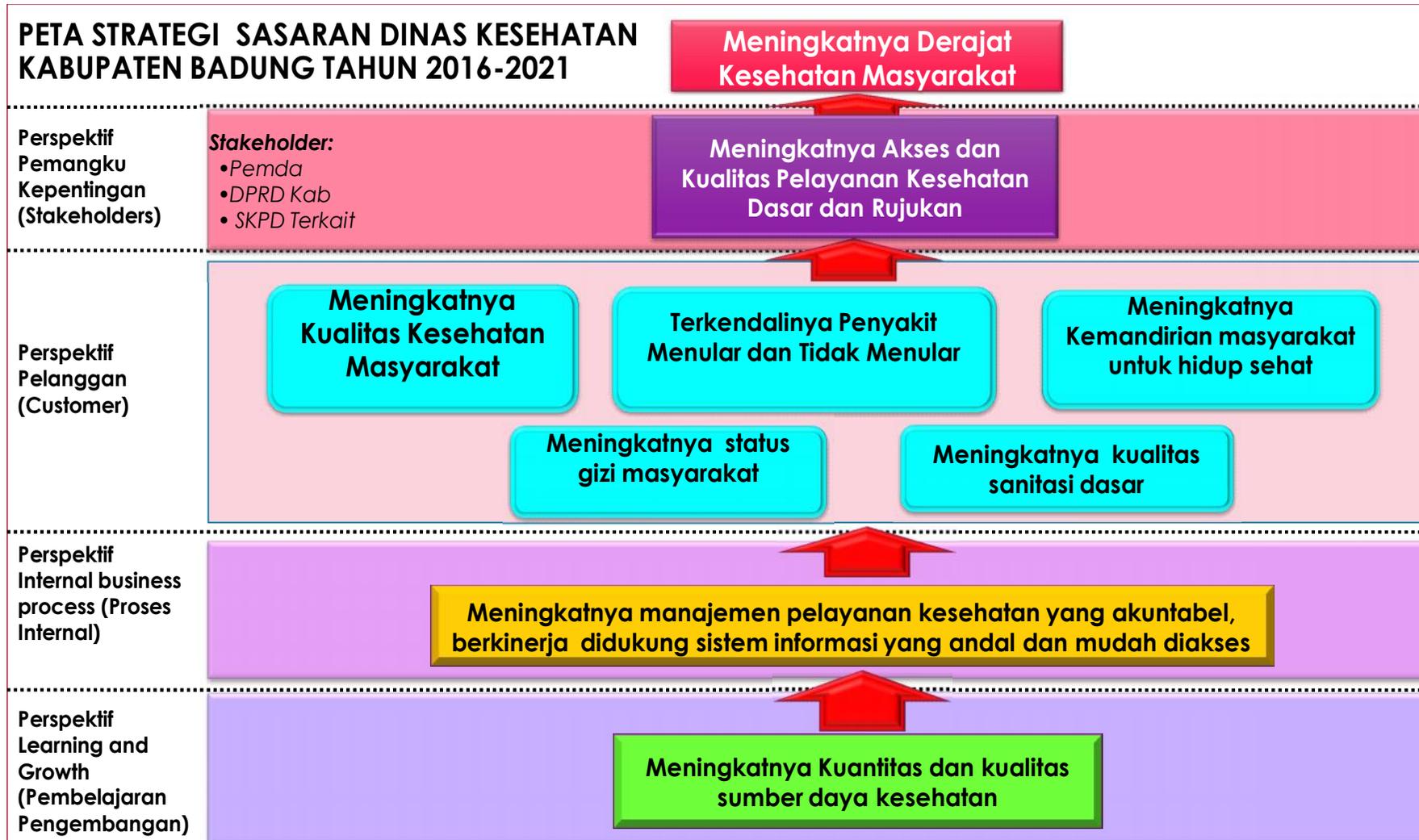
akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses

d. Perspektif *learning and growth*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya *internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.*

Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya organisasi melalui inovasi internal organisasi. Kestinambungan suatu organisasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada seberapa besar inovasi yang dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan kelompok perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (*learning and growth*) terdapat dua sasaran strategis yaitu : **Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan**

Adapun gambaran peta sasaran strategis Dinas Kesehatan dengan metode *Balanced Scorecard (BSC)*, seperti pada Gambar 4.1.



4.2. Indikator Sasaran Strategis

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Indeks keluarga sehat	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,8
			3 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	92,3%	92,3%	100%	100%	100%	100%
			4 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.877 Penduduk	8.877 Penduduk	8.759 Penduduk	8.643 Penduduk	8.531 Penduduk	8.531 Penduduk
			5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	23%	40%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	2021
		2 Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	93.83	90.83	87.83	85	85	85
			2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	3.74	3.37	2.99	2.99	2.99	2.99
			3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	4,8%	4.6%	4,4%	4,2%	4,0%	4,0%
		4 Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat	82%	83%	84%	85%	86%	86%
2 Persentase siswa sehat	90%		92%	94%	96%	96%	96%		
5 Meningkatkan Kualitas Sanitasi Dasar	1 Persentase Rumah Sehat	91%	92%	93%	94%	94%	94%		
	2 Persentase TTU Sehat	94,6%	95%	95,5%	96%	97%	97%		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	2021
		6 Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	10 Jam	8 Jam	7 Jam	6 Jam	5 Jam	5 Jam
			3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5 Angka kesakitan DBD	275	250	225	200	200	200

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	2021
		7 Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses	1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Persentase Fasilitas Kesehatan Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i>	18,92%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Nilai evaluasi LKjIP	BB	BB	A	A	A	A
			4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik	98%	100%	100%	100%	100%	100%
		8 Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan	5 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari
			3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	65%	70%	75%	80%	85%	85%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas, dengan sasaran untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka fokus pembangunan kesehatan untuk pemantapan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar (*Primary health Care*) dan pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 yaitu :

- a. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
- b. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
- c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
- g. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan kesehatan sesuai RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

- a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (*continuum of care*).

- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- c. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- d. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- e. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- f. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- g. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- h. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- i. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- j. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
- k. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- l. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- m. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based)
- n. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- o. Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai standar ISO 9001 : 2008.

p. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Badung maka Dinas Kesehatan merumuskan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran strategis seperti berikut :

1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan

Kebijakan :

- a) Pemerataan dan memperluas jangkauan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
- b) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui JKN-KIS.
- c) Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis
- d) Peningkatan mutu layanan semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) memenuhi standar akreditasi.

Strategi :

- a) Melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar
- b) Memperkuat peran Puskesmas Pembantu (PUSTU) dalam pelayanan kesehatan melalui revitalisasi kegiatan dan reorganisasi pelayanan
- c) Menyediakan ambulance desa di semua desa/kelurahan untuk memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan
- d) Mendorong inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer & rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- e) Menyediakan anggaran yang cukup untuk

pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung

- f) Meningkatkan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- g) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta
- h) Menerapkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar sesuai ISO 9001 : 2008
- i) Mengembangkan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan dengan membentuk tim kendali mutu dimasing-masing fasilitas pelayanan kesehatan
- j) Mewujudkan sistem manajemen kinerja FKTP melalui instrument penilaian kinerja.
- k) Mengembangkan kotak aduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kebijakan :

- a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (*continuum of care*)
- b) Peningkatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat atau gernas

Strategi :

- a) Memperluas Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, & Lanjut Usia yang Berkualitas
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,

- d) Peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi
 - e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
 - f) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
 - g) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas
 - h) Peningkatan pelayanan kesehatan anak
 - i) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja
 - j) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia
 - k) Peningkatan peran lintas sektor
- 3) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
- Kebijakan :
- a) Pemberian Imunisasi kepada seluruh Bayi umur 0 - 11 bulan.
 - b) Peningkatan vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi baik yang bersifat khusus maupun kebutuhan pengembangan program.
 - c) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan tidak menular didukung data *evidence base*.
 - d) Peningkatan Pengendalian Penyakit tidak menular berbasis masyarakat
 - e) Pemberian layanan spesialisik dan berkesinambungan termasuk pencegahan diskriminasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
 - f) Peningkatan jejaring kemitraan antar fasilitas kesehatan dan sektor terkait dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular.
 - g) Menempatkan petugas juru pemantau jentik (jumantik)

di setiap banjar di Kabupaten Badung untuk memantau perkembangan jentik dan kasus DBD termasuk memberikan sosialisasi penanggulangannya.

Strategi :

- a) Peningkatan upaya-upaya promotif dan preventif dalam pengendalian faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.
- b) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah.
- c) Peningkatan pelayanan imunisasi secara rutin maupun insidental.
- d) Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk pengendalian penyakit menular secara cepat.
- e) Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus.
- f) Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (*neglected tropical diseases*)
- g) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- h) Rekrutmen tenaga pemantau jentik untuk ditempatkan di setiap banjar
- i) Melakukan deteksi dini secara pro-aktif mengunjungi masyarakat untuk deteksi awal penyakit tidak menular
- j) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui *community base surveillance* pengamatan berbasis masyarakat

4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Kebijakan :

- a) Peningkatkan KIE kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
- b) Menumbuhkembangkan peran masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok peduli kesehatan

Strategi :

- a. Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
 - a) Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan tradisional
 - b) Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan.
 - c) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui gerakan keluarga sehat
 - d) Mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.
 - e) Mendorong kebijakan PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok
 - f) Memantapkan peran desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan siaga aktif
 - g) Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam promosi dan pemberdayaan kesehatan
- 5) Meningkatnya kualitas sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan pemukiman

Kebijakan :

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sanitasi dasar yang layak serta pengawasan keamanan pangan.

Strategi :

- a) Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan persyaratan kesehatan
 - b) Mendorong masyarakat untuk memiliki akses sanitasi dasar yang memadai
 - c) Melaksanakan pemantauan kualitas keamanan pangan
 - d) Meningkatkan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu Desa SBS.
 - e) Memantapkan pencapaian kabupaten sehat pada semua tatanan
- 6) Meningkatnya status gizi masyarakat

Kebijakan :

Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.

Strategi :

- a) Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi
 - b) Peningkatan promosi mengenai perilaku masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi, *hiegiene*, dan pengasuhan
 - c) Mendorong peningkatan konsumsi gizi mikro bagi masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi.
- 7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses

Kebijakan :

- a) Perencanaan pembangunan kesehatan berbasis data (evidence base) dan melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan

- b) Melakukan evaluasi program pembangunan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan.
- c) Mendorong penerapan akuntabilitas kinerja pada jenjang struktur organisasi melalui penyusunan cascading kinerja dan menyusun rencana aksi untuk setiap sasaran strategis.
- d) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid dan akurat berbasis teknologi web site untuk memperkuat manajemen pelayanan kesehatan.
- e) Peningkatan tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah

Strategi :

- a) Proses perencanaan dan evaluasi program kesehatan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan
 - b) Menyusun perencanaan dan evaluasi terhadap program kesehatan sesuai yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra
 - c) Mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis web site di sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama serta terkoneksi dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
 - d) Mengembangkan sistem informasi Kesehatan "*real time monitoring*" yang mudah diakses masyarakat melalui Komunikasi Badung Sehat (KBS).
 - e) Menyelenggarakan tertib administrasi terhadap asset-asset kesehatan
 - f) Melaksanakan verifikasi asset kesehatan secara berkala
- 8) Meningkatnya pemenuhan dan kualitas sumber daya kesehatan
- Kebijakan :
- a) Peningkatan pemenuhan terhadap kebutuhan obat,

bahan habis pakai dan peralatan kesehatan.

b) Peningkatan pengelolaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan.

c) Peningkatan pengelolaan tenaga kesehatan

Strategi :

a) Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan.

b) Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan.

c) Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.

d) Pengembangan sistem kinerja.

e) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.

f) Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

g) Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya.

h) Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

i) Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis.

j) Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan visi dan misi maka diperlukan suatu strategi tertentu. Strategi yang disusun, berupa kebijakan-kebijakan dalam upaya mengimplementasikan misi yang telah dicanangkan, sehingga dapat dijadikan payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran.

Program Prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung dalam lima tahun mendatang, mengacu pada program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) meliputi :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama : Pembangunan POSKESDES dan POLINDES di masing-masing Desa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua Kecamatan se-Provinsi Bali.
3. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap dan membuat regulasi tentang penambahan Dokter Spesialis di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

5. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD.
6. Pengadaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke Desa-Desa (pelayanan kegawat darurat).

Adapun rincian program, kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan kesehatan, seperti berikut :

5.1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di dinas kesehatan, UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi.

Rincian kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan
- c. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)
- d. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Survey Kepuasan Masyarakat
- f. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan
- g. Monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan

5.2. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di dinas kesehatan, UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi.

Kegiatan :

- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Optimalisasi Pengelolaan Obat

5.3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di puskesmas, pustu, sekolah, desa siaga dan masyarakat

Rincian kegiatan :

- a. Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas
- b. PePembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi
- c. Pembinaan kader PHBS Desa
- d. Peningkatan Pelayanan Posyandu
- e. Pembinaan Posyandu
- f. Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat
- g. Pelatihan Kader Posyandu
- h. Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)
- i. Penyelenggaraan Posyandu Paripurna
- j. Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
- k. Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks dan Payudara
- l. Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
- m. Peningkatan Penanggulangan Kanker
- n. Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut
- o. Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat
- p. Pelayanan Kesehatan Keliling Untuk Masyarakat Desa/Kel
- q. Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
- r. Lomba Klinik Swasta Berprestasi
- s. Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional
- t. Sosialisasi dan Kepedulian Kanker Kepada Masyarakat
- u. Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada

- v Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap
- w Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas
- y Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)
- z Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung
- aa Pemeran Promosi Kesehatan Masyarakat
- ab Pendampingan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- ac Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian
- ad Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
- ae Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
- af Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat
- ag Lomba Puskesmas Berprestasi
- ah Survey Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat
- ai Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional
- aj Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah
- ak Pelatihan Petugas Kantin Sehat
- al Penyediaan Penunjang Kinerja Kader Posyandu
- am Pelatihan Guru Pembina KSPAN dan Sosialisasi HIV AIDS di Sekolah
- an Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi
- ao Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
- ap Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi
- aq Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)

- ar Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- as Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat
- at Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat
- au Monitoring Layanan Krama Badung Sehat
- av Pemantauan Krama Badung Sehat
- aw Workshop Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
- ax Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKBB) Manguwaras Tahun 2016
- ay Gebyar "GERMAS" Untuk Hidup Sehat
- az Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung
- ba Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas
- bb Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- bc Pembinaan Kepatuhan Terhadap Perda KTR
- bd Operasional Mobil Promosi Kesehatan
- be Pelayanan Dokter Spesialis (Residen) di Puskesmas Rawat Inap
- bf Media Promosi Kesehatan Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT
- bg Operasional Mobil Klinik Keliling
- bh Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas

5.4. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di puskesmas, pustu,
dan masyarakat

Rincian kegiatan :

- a. Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung
- b. Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT

5.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kelompok sasaran : Bayi, balita, ibu hamil dan keluarga

Rincian kegiatan :

- a. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A, kekurangan zat gizi mikro lainnya
- b. Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan gizi seimbang dalam rangka Peningkatan Capaian Keluarga Sadar Gizi

5.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kelompok sasaran : Pengelola Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan serta masyarakat

Rincian kegiatan :

- a. Kabupaten Sehat
- b. Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu
- d. Penyelenggaraan Studi Environmental Helath Risk Assessment (EHRA)

5.7. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Kelompok sasaran : bayi, anak sekolah, wanita usia subur dan masyarakat

Rincian kegiatan :

- a. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
- b. Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi

- c. Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah
- d. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
- e. Pemberantasan Penyakit Menular Rabies
- f. Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis
- g. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan Pendampingan ODHA
- h. Pelatihan Petugas Jumantik
- i. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran
- j. Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi
- k. Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE
- l. Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS
- m. Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
- n. Pelaksanaan vaksinasi khusus

5.8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di dinas kesehatan, UPT
Puskesmas

Rincian kegiatan :

- a. Layanan UGD Puskesmas 24 Jam
- b. Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan
- c. Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan
- d. Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas
- e. Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan SPT
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat (KBS)
- g. Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas
- h. Reakreditasi Puskesmas

5.9. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di dinas kesehatan, UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi.

Rincian kegiatan :

- a. Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas
- b. Pengadaan Mesin Incinerator dan IPAL
- c. Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas
- d. Pengadaan Genset dan perlengkapannya
- e. Pengembangan Sistem Informasi berbasis web dengan pengembangan Komunikasi Badung Sehat
- f. Pengadaan alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan)
- g. Pengadaan food security kit
- h. Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Pembantu
- i. Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan
- j. Pengadaan Sanitarian kit

5.10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kelompok sasaran : bayi, anak sekolah, wanita usia subur dan masyarakat

Rincian kegiatan :

- a. Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/ bidan/ fisioterapis/perawat/optikal
- b. Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung
- c. Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan

5.11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kelompok sasaran : ibu hamil, dan anak

Rincian kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)
- b. Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB
- c. Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI
- d. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal
- e. Jaminan Persalinan (Jampersal)
- f. Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal
- g. Pelatihan APN Pelaksanaan AMP Penemuan dan pemantauan Ibu hamil risiko tinggi lintas sektor Pengadaan Bahan Penyuluhan
- h. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

5.12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kelompok sasaran : anak balita, dan remaja

Rincian kegiatan :

- a. Pelatihan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak (SDDTKA)
- b. Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak
- c. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

5.13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kelompok sasaran : masyarakat lanjut usia

Rincian kegiatan :

- a. Pelayanan kesehatan lansia

5.14. Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di Puskesmas dan Pustu

Rincian kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis
- b. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

5.15. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di Puskesmas dan Pustu

Rincian kegiatan :

- a. Pemeliharaan Alat Kesehatan
- b. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan

5.16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di Puskesmas dan Pustu

Rincian kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- c. Pelayanan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan alat tulis kantor dinas dan UPT Puskesmas
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman dinas dan UPT
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j. Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional
- k. Penyediaan upacara keagamaan
- l. Penyediaan dekorasi

- m. Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah
- n. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
- o. Mecaru dan melaspas bangunan puskesmas dan pustu
- p. Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat
- q. Penyediaan jasa publikasi pelelangan melalui media cetak
- r. Penyediaan jasa kebersihan kantor UPT Dinas Kesehatan

5.17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di Puskesmas dan Pustu

Rincian kegiatan :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan utin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan perlengkapan kantor
- f. Pemeliharaan peralatan kantor
- g. Pemindahan sementara peralatan dan perlengkapan gedung kantor UPT Dinas Kesehatan
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL
- j. Survey sarana kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung
- k. Pemeliharaan Mesin Genset

5.18. Program Perencanaan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran : Aparatur pemerintah di Puskesmas dan Pustu

Rincian kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

BAB VI

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Dinas Kesehatan Kabupten Badung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Indikator kinerja yang disusun dalam Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, memperhatikan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, isu-isu global, nasional, regional serta adanya kearifan lokal untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan. Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Kondisi Awal 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	70.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks keluarga sehat	Tidak Ada Data	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,8
3	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	0	92,3%	92,3%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.330 Penduduk	8.877 Penduduk	8.877 Penduduk	8.759 Penduduk	8.643 Penduduk	8.531 Penduduk	8.531 Penduduk
5	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	0	23%	40%	100%	100%	100%	100%
6	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	0.00	93.83	90.83	87.83	85	85	85
7	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	4.04	3.74	3.37	2.99	2.99	2.99	2.99
8	Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	12,5%	4,8%	4,6%	4,4%	4,2%	4,0%	4,0%
10	Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	80,16%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
11	Persentase siswa sehat	85.30%	90%	92%	94%	96%	96%	96%
12	Persentase Rumah Sehat	90,59%	91%	92%	93%	94%	94%	94%
13	Persentase TTU Sehat	96,65%	94,6%	95%	95,5%	96%	97%	97%

NO	Indikator	Kondisi Awal 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
14	Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	25%	10 Jam	8 Jam	7 Jam	6 Jam	5 Jam	5 Jam
16	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Angka kesakitan DBD	639,70	275	250	225	200	200	200
19	Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Fasilitas Kesehatan Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i>	0	18,92 %	100%	100%	100%	100%	100%
21	Nilai evaluasi LKJIP	BB	BB	BB	A	A	A	A
22	Persentase Pegawai dengan kinerja Baik	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan	14 Hari	5 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari
25	Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
26	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Awal 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
27	Persentase kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Tidak Tersedia Data	98%	98%	98%	98%	98%	98%
28	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15%	46.15 %	46.15 %	46.66 %	46.66 %	52.94 %	52.94%
29	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase kemandirian posyandu purnama dan mandiri	97,74	99%	99%	99%	99%	99%	99%
32	Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase desa yang melaksanakan STBM	20,97%	58,25 %	62,35 %	65,40 %	68,12 %	68,12 %	68,12%
35	Persentase Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat	19,35%	19,35 %	29,03 %	32,26 %	38,71 %	45,16 %	45,16%
36	Cakupan penanganan penderita hipertensi	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Cakupan penanganan penderita diabetes	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Tidak tersedia data	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Awal 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
39	Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	87.82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit bersumber binatang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Persentase Penyehat Tradisional yang menerapkan kaidah kesehatan	0	25%	50%	75%	100%	100%	100%
43	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase Tempat Pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	83%	0	0	87%	89%	92%	92%
45	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	93,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	95,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	96,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49	Persentase kesehatan alat dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung periode Tahun 2016-2021;
3. Kinerja tahunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan

menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Mangupura, Oktober 2017
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	URUSAN WAJIB					267.026,121		390.995,069		560.285,517		613.972,250		669.919,519		2.455.464,702			
02	URUSAN KESEHATAN					267.026,121		390.995,069		560.285,517		613.972,250		669.919,519		2.455.464,702			
	DINAS KESEHATAN					267.026,121		390.995,069		560.285,517		613.972,250		669.919,519		2.455.464,702			
01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Administrasi perkantoran yang ada dibagi jumlah kebutuhan Administrasi perkantoran kali 100	100%	100%	10.973,638	100%	15.823,789	100%	17.116,949	100%	18.934,500	100%	22.915,522	100%	85.764,397	Diskes		
	Kegiatan :																		
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik diskas, upt pusk, IFK, bkia dan pustu	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik diskas, upt pusk, IFK, bkia dan pustu	76 lokasi	76 lokasi	1.802,858	78 lokasi	3.101,100	80 lokasi	3.539,320	82 lokasi	4.746,286	84 lokasi	5.970,915	83 lokasi	19.160,479			
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan diskas, UPT IFK, UPT Pusk, TB, HIV, Bus Mawas, yang disamsat dan di KIR	Jumlah kendaraan diskas, UPT IFK, UPT Pusk, TB, HIV, Bus Mawas, yang disamsat dan di KIR	182 unit	275 Unit	170,140	285 Unit	215,420	321 unit	228,524	336 unit	240,377	343 unit	265,415	343 unit	1.119,876	Diskes		
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	jumlah meterai dan buku cek yang dipergunakan oleh diskas dan UPT Pusk	jumlah meterai dan buku cek yang dipergunakan oleh diskas dan UPT Pusk	15 Paket	5828 Lembar	22,710	7808 Lembar	36,875	8200 Lembar	41,355	8350 Lembar	42,129	8525 Lembar	45,893	8525 Lembar	188,961			
10	Penyediaan alat tulis kantor dinas dan UPT Pusk.	Jumlah ATK yang dibeli untuk Diskes dan UPT	Jumlah ATK yang dibeli untuk Diskes dan UPT	15 Paket	2 Paket	311,958	2 Paket	396,089	2 Paket	442,201	2 Paket	464,311	2 Paket	533,957	2 Paket	2.148,516			
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetak dan foto copy yang dibeli untuk Diskes dan UPT	Jumlah blanko cetak dan foto copy yang dibeli untuk Diskes dan UPT	15 Paket	2 Paket	206,071	2 Paket	268,052	2 Paket	292,106	2 Paket	306,711	2 Paket	352,718	2 Paket	1.425,658			
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli Diskes dan UPT	Jumlah komponen listrik yang dibeli Diskes dan UPT	15 Paket	2 Paket	46,981	2 Paket	134,000	2 Paket	186,063	2 Paket	198,515	2 Paket	225,392	2 Paket	790,951			
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli Diskes dan UPT	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli Diskes dan UPT	15 Paket	15 Paket	128,580	17 Paket	146,760	19 Paket	156,899	21 Paket	160,821	22 Paket	168,862	22 Paket	761,922			
17	Penyediaan makanan dan minuman dinas dan UPT	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli diskas dan UPT	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli diskas dan UPT	1 Tahun	1 Tahun	43,236	1 Tahun	167,034	1 Tahun	181,064	1 Tahun	189,225	1 Tahun	196,483	1 Tahun	777,041			
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi keluar daerah	30 kali	1 Paket	350,000	1 Paket	450,000	1 Paket	500,000	1 Paket	525,000	1 Paket	650,000	1 Paket	2.475,000			
29	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar yang dibeli diskas dan upt	Jumlah bahan bakar yang dibeli diskas dan upt	195 unit	275 Unit	1.811,454	289 Unit	2.287,800	321 unit	2.386,500	336 unit	2.587,500	343 unit	2.975,000	343 Unit	12.048,254			
31	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah banten purnama, talem, kajeng kliwon, galungan, kuningan, t landep, saraswati, pagerwesi dan odalan yang dibeli diskas, UPT ,TB dan HIV	Jumlah banten purnama, talem, kajeng kliwon, galungan, kuningan, t landep, saraswati, pagerwesi dan odalan yang dibeli diskas, UPT ,TB dan HIV	201.925 tanding	203537 tanding	1.631,794	203537 tanding	1.897,880	203537 tanding	2.158,047	203537 tanding	2.481,754	203537 tanding	2.854,017	201.925 tanding	11.023,493			
35	Penyediaan dekorasi	Jumlah spanduk, penjor dan bendera yang dibeli diskas	Jumlah spanduk, penjor dan bendera yang dibeli diskas	16 buah	1 Paket	6,325	1 Paket	128,000	1 Paket	132,000	1 Paket	145,000	1 Paket	155,000	1 Paket	566,325			
36	Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah pakaian olahraga khusus kegiatan lomba-lomba yang dibeli diskas	Jumlah pakaian olahraga khusus kegiatan lomba-lomba yang dibeli diskas	50 Stel	1 Paket	15,000	1 Paket	50,000	1 Paket	60,000	1 Paket	70,000	1 Paket	80,000	1 Paket	275,000			
37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap dan atk yang terbeli oleh diskas	Jumlah jasa pegawai tidak tetap dan atk yang terbeli oleh diskas	1 orang	1 orang	60,953	1 orang	63,871	1 orang	316,437									
44	Mecaru dan melaspas bangunan puskesmas dan pustu	Jumlah pelaksanaan mecaru dan melaspas	Jumlah pelaksanaan mecaru dan melaspas	11 Paket	5 Paket	405,000	5 Paket	760,000	6 Paket	380,000	5 Paket	300,000	0	20 Paket	1.845,000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	54 Pelaksanaan upacara penganyaran kepura-pura kahyangan jagat	Jumlah jasa transportasi akomodasi dan aci aci penganyaran kepura-pura kahyangan jagat diskes	Jumlah jasa transportasi akomodasi dan aci aci penganyaran kepura-pura kahyangan jagat diskes	1 paket	1 paket	40,000	1 paket	129,000	1 paket	141,000	1 paket	145,000	1 paket	150,000	5 paket	605,000	
	59 Penyediaan jasa publikasi peletangan melalui media cetak	Jumlah jasa publikasi peletangan melalui media cetak	Jumlah jasa publikasi peletangan melalui media cetak	4 Paket	10 Paket	6,357	-	10 Paket	15,000	10 Paket	15,000	10 Paket	15,000	10 Paket	40 Paket	51,357	
	64 Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan UPT dan pustu yang terbayar	Jumlah Jasa Kebersihan UPT dan pustu yang terbayar	126 Orang	126 Orang	3.914,221	166 orang	5.591,908	196 orang	6.213,000	196 orang	6.253,000	265 orang	8.213,000	265 orang	30.185,129	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur kali 100	100%	100%	18.718,723	100%	20.453,093	100%	23.522,648	100%	28.543,785	100%	26.053,696	100%	117.291,945	
	05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan operasional dinas yang dibeli	Jumlah Kendaraan operasional dinas yang dibeli	Roda 2 : 5 Unit, Roda 4 : 1 unit	0	455,000	-	Roda 2 : 10 Unit, Roda 4 : 2 Unit	655,000	Roda 2 : 5 Unit, Roda 4 : 1 Unit	327,500	0	-	Roda 2 : 38 Unit, Roda 4 : 7 unit	1.437,500		
	07 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Paket	5,545,167	1 Paket	6,366,282	1 Paket	6,250,500	1 Paket	8,750,000	1 Paket	7,330,000	1 Paket	34,241,949	
	09 Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Paket	6,933,466	1 Paket	6,176,100	1 Paket	7,600,000	1 Paket	9,250,000	1 Paket	7,500,000	5 Paket	37,459,566	
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	1 Paket	527,000	1 Paket	599,000	1 Paket	712,000	1 Paket	825,000	1 Paket	965,000	1 Paket	3,628,000	
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	182 unit	274 Unit	1.589,338	285 Unit	3,721,000	321 Unit	4,403,097	336 Unit	5,109,291	343 unit	5,424,384	343 unit	20,247,110	
	26 Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	441,400	1 Paket	503,124	1 Paket	578,500	1 Paket	655,000	1 Paket	775,000	1 Paket	2,953,024	
	28 Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	186,000	1 Paket	432,069	1 Paket	552,500	1 Paket	625,700	1 Paket	730,750	1 Paket	2,527,019	
	63 Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Jumlah pemindahan sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Jumlah pemindahan sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	132,000	1 Paket	191,200	1 Paket	60,000	1 Paket	20,000	1 Paket	50,000	5 Paket	453,200	
	75 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	1 paket	1 paket	2,532,550	1 paket	1,921,433	18 paket	2,113,576	20 paket	2,324,934	21 paket	2,557,427	21 paket	11,449,921	
	87 Pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL	Jumlah Incinerator dan IPAL yang dipelihara	Jumlah Incinerator dan IPAL yang dipelihara	9 Unit Incinerator , 12 Unit IPAL	9 Unit Incinerator , 12Unit IPAL	240,262	9 Unit Incinerator , 13Unit IPAL	246,826	9 Unit Incinerator , 13Unit IPAL	271,508	9 Unit Incinerator , 13Unit IPAL	298,659	9 Unit Incinerator , 13Unit IPAL	328,525	9 Unit Incinerator , 13Unit IPAL	1,385,781	
	89 Survey sarana kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	Jumlah survey sarana kesehatan	Jumlah survey sarana kesehatan	0	13 Pusk	8,908	13 Pusk	7,558	13 Pusk	8,615	13 Pusk	8,615	13 Pusk	8,615	13 Pusk	42,311	
	92 Pemeliharaan Mesin Genset	Jumlah Mesin Genset yang dipelihara	Jumlah Mesin Genset yang dipelihara	13	16 Genset	127,631	16 genset	288,501	16 genset	317,351	16 genset	349,086	16 genset	383,995	16 genset	1,466,565	
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi LKJIP Dinas Kesehatan Kab. Badung	Nilai LKJIP dari penilaian inspektorat	BB	BB	614,515	BB	643,741	A	410,220	A	415,220	A	420,220	A	2,503,917	
		Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	Jumlah Laporan keuangan lengkap, tepat dan akurat dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan kali 100	84,15%	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%		
	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan mendapat Honorarium	Jumlah pengelola kegiatan mendapat Honorarium	38 Org	38 Org	575,820	126 Kegiatan	616,080	38 Org	286,089	38 Org	286,089	38 Org	286,089	38 Org	2,050,166	
	05 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil kesehatan	Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil kesehatan	40 Org	40 Org	11,285	50 Buku	11,532	40 Org	1,600	40 Org	1,600	40 Org	1,600	40 Org	27,617	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	07	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah buku/Dokumen RKA yang dicetak	Jumlah buku/Dokumen RKA yang dicetak	50 Buku	50 Buku	15,002	0	-	0	-	0	-	0	-	50 Buku	15,002	
	08	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	50 Buku	50 Buku	6,002	4 Dokumen	9,659	50 Buku	15,998	50 Buku	15,998	50 Buku	15,998	50 Buku	63,654	
	12	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat	Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat	17 Lokasi	0,00	-			19 Lokasi	80,000	21 Lokasi	85,000	22 Lokasi	90,000	22 Lokasi	255,000	
	13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	1 Paket	1 Paket	6,406	1 Paket	6,470	1 Paket	6,098	1 Paket	6,098	1 Paket	6,098	1 Paket	31,169	
	00	Monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan			0,00	15 Kantor	-			15 Kantor	20,437	15 Kantor	20,437	15 Kantor	20,437	15 Kantor	61,310	
	09	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras dibagi jumlah dokumen perencanaan kali 100		0,00	-	98%	11,509	98%	9,998	98%	9,998	98%	9,998	98%	41,503	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen perencanaan (renstra, Renja dan RKA) yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan (renstra, Renja dan RKA) yang disusun	50 Buku	0	3 Dokumen	11,509	3 Dokumen	9,998	3 Dokumen	9,998	3 Dokumen	9,998	15 Dokumen	41,503		
	11	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah puskesmas yang ada kali 100	78,70%	100%	3.810,502	100%	4.083,917	100%	4.329,341	100%	4.199,341	100%	4.205,841	100%	20.628,941	
	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah puskesmas yang ada kali 100	78,70%	100%	3.743,119	100%	4.042,206	100%	4.134,341	100%	4.134,341	100%	4.134,341	100%	20.188,347	
	02	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Jumlah pendistribusian obat ke Puskesmas	Jumlah pendistribusian obat ke Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	67,383	15 Puskesmas	41,711	17 Puskesmas	195,000	18 Puskesmas	65,000	18 Puskesmas	71,500	18 Puskesmas	440,594	
	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	70,97%	80%	145.952,532	90%	258.120,756	100%	396.521,977	100%	437.236,883	100%	480.334,485	100%	1.671.734,856	
			Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Indeks Keluarga Sehat yang bernilai 1 dibagi 12 - Jumlah seluruh keluarga yang ada kali 100	Tidak Tersedia Data	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
			Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	46,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat ditangani dibagi jumlah orang dengan gangguan jiwa berat kali 100	62,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	01	Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina	Jumlah Puskesmas yang dibina	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	106,695	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	103,958							15 Pusk. 15 Pustu dan 78 Nakes	210,652	
	02	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Jumlah Sekolah Predikat Sehat Tk. Provinsi	Jumlah Sekolah Predikat Sehat Tk. Provinsi	4 sekolah	3 sekolah	241,853	3 sekolah	60,674							16 sekolah	302,528	
	04	Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	80.16 %	82%	63,920	84%	49,889							90%	113,809	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	96%	96%	97%	3.912,839										99%	3.912,839	
05	Pembinaan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	95,11	96,00%	0,00%	-	89,009									98,00%	89,009	
06	Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	150 kader	150 kader		-	55,798									700 Kader	55,798	
09	Peningkatan Penanggulangan kanker serviks dan payudara	Jumlah perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	657 orang	-		18.271,801										42867 orang	18.271,801	
10	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan mata	Jumlah kasus gangguan kesehatan mata dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	13 Puskesmas	1,65%	1,7%	49,851	48,150	1,7%	49,851	1,7%	58,261	1,75%	64,087	1,8%	70,496	1,8%	290,845	
12	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	9 sekolah	9 sekolah	2 sekolah	381,204	150,579		9 sekolah		419,324	9 sekolah	461,257	9 sekolah	507,383	9 sekolah	1.919,747	
13	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar (PelayanannKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit, PHBS)	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayanannKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit, PHBS)	60 Posyandu	12 Posyandu	12 Posyandu	906,392	851,604									120 Posyandu	1.757,997	
16	Sosialisasi dan kepedulian Kanker kepada Masyarakat	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	600 orang	600 orang		80,259												
19	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah msyarakat yang disosialisasi dan dilakukan tes Urine	Jumlah sekolah/kelompok masyarakat yang dilakukan tes Urine	16 Sekolah	1000 orang	4000 orang	415,514	102,008		4000 orang	4000 orang	380,900	4000 orang	418,990	4000 orang	460,889	17000 orang	1.778,302	
20	Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Jumlah sekolah yang dilombakan	Jumlah sekolah yang dilombakan	108 Sekolah	4 Sekolah	0	-	56,996	0	0	0	-	0	-	0	-	20 Sekolah	56,996	
22	Pelatihan Petugas Kantin Sehat	Jumlah penjamah/pegek	Jumlah	250 Orang	50 Orang	0	-	32,012	0	0	0	-	0	-	0	-	550 orang	32,012	
24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang mendapat upah kerja	Jumlah kader posyandu yang mendapat upah kerja	2.865 orang	2.735 org.	0	-	2.965,983	0	0	0	-	0	-	0	-	2.790 orang	2.965,983	
26	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	5134	10000 orang	10000 orang	559,245	425,313		10000 orang	10000 orang	615,169	10000 orang	676,686	10000 orang	744,355	10000 orang	3.020,768	
27	Peningkatan Penanggulangan Kanker	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	1200 WUS	3360 WUS	3360 WUS	3.658,932	2.025,232		4320 WUS	4320 WUS	4.024,825	4800 WUS	4.427,308	4800 WUS	4.870,038	21120 WUS	19.006,335	
28	Pelatihan Guru Pembina KSPAN dan Sosialisasi HIV AIDS di Sekolah	Persentase siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS	Jumlah siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS dibagi jumlah seluruh siswa kali 100	3%	9%	0	-	92,083	0	0	0	-	0	-	0	-	21%	92,083	
31	Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	12 Sekolah	12 Sekolah	0	-	78,853	0	0	0	-	0	-	0	-	84 sekolah	78,853	
32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	4 Pos UKK	6 Pos UKK	0	-	39,259	0	6 Pos UKK	6 Pos UKK	39,259	6 Pos UKK	39,259	6 Pos UKK	39,259	24 Pos UKK	157,037	
33	Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	3,4%	4,40%	3,80%	15,8	21,413		4,00%	4,00%	17,4	4,2%	19,1	4,4%	21,1	4,6%	94,860	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah ODSJ Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan gangguan kesehatan jiwa yang ditangani dibagi jumlah orang gangguan jiwa	130 orang	130 orang	84,858	150 orang	200,686	170 orang	220,755	190 orang	242,830	210 orang	267,113	210 orang	1.016,243
	36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	12 Sekolah	12 Sekolah	61,717	0	-	0	-	0	-	0	-	84 sekolah	61,717
	38	Peningkatan kualitas layanan puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	1 Paket	211Orang	5.771,846	-	-	-	-	-	-	-	-	211Orang	5.771,846
	39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	0,00	1 Paket	86,074	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Paket	86,074
	40	Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	Jumlah penduduk yang mendapat Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	Jumlah penduduk yang mendapat Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	0,00	464622 Orang	92.117,400	474558 orang	101.932,045	562193 Orang	168.657,900	618412 Orang	185.523,600	680253 Orang	204.075,900	680253 Orang	752.360,845
	42	Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang Mendapat Pelatihan BLUD	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	1 Paket	46 orang	207,000	0	-	0	-	0	-	0	-	15 Pusk	207,000
	43	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kel.	Jumlah Desa/kel yang mendapat pelayanan kesehatan keliling	Jumlah Desa/kel yang mendapat pelayanan kesehatan keliling	-	62 desa/kel	13.112,744	62 desa/kel	15.718	62 desa/kel	17.227	62 desa/kel	20.673	62 desa/kel	22.740	62 desa/kel	89.470,081
	44	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	jumlah desa yang mendapatkan Sosialisasi Jaminan Krama Badung Sehat	jumlah desa yang mendapatkan Sosialisasi Jaminan Krama Badung Sehat	0	62 Desa/573 banjar	154,829	0	-	0	-	0	-	0	-	62 Desa/573 banjar	154,829
	45	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	0	369 Sekolah	175,820	369 Sekolah	37,495	-	-	-	-	-	-	369 Sekolah	213,315
	46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah pengelola Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah pengelola Kesehatan Krama Badung Sehat	0	18 Orang	571,928	0	-	0	-	0	-	0	-	18 Orang	571,928
	47	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	0,00	1 Paket	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Paket	0,000
	48	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	0,00	1 Paket	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Paket	0,000
	50	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	1 klinik	6 klinik	21,270	1 klinik	30,3	1 klinik	33,3	1 klinik	36,6	1 klinik	40,3	1 klinik	161,795
	51	Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	0	50 Penyehat	32,554	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	52	Monitoring layanan Krama Badung Sehat	Jumlah faskes yang dimonitor pelaksana layanan Krama Badung Sehat	Jumlah faskes yang dimonitor pelaksana layanan Krama Badung Sehat	0	73FKTP/4 FKTL	93,374	0	-	0	-	0	-	0	-	121 FKTP/7 FKTL	93,374
	53	Peningkatan pelayanan puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	3 Pusk.	3 Pusk.	205,441	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Pusk.	205,441
	54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah pendistribusian kartu dan pemantauan kartu badung sehat	Jumlah pendistribusian kartu dan pemantauan kartu badung sehat	0	464222	520,273	-	562193	132,773	618412	132,773	680253	132,773	680253	918,590	
	16	Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	0	60 Penyehat	214,224	60 Penyehat	214,224	0	-	0	-	0	-	60 Penyehat	214,224
	17	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada	Jumlah kader pramuka mendapat pembinaan saka bakti husada	Jumlah kader pramuka mendapat pembinaan saka bakti husada	0	0	-	30 orang	69,259	30 orang	75,488	30 oran	83,036	30 orang	91,339	120 orang	319,122
	18	Peningkatan Kualitas pelayanan puskesmas	Jumlah Puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	-	13 Pusk.	19.206,683	13 Pusk.	19.206,683	13 Pusk.	21.127,351	13 Pusk.	23.240,086	13Pusk.	25.564,095	13 Pusk.	28.120,505
	19	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan KBS	Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan KBS	0,00	474558 jiwa	101.932,045	474558 jiwa	101.932,045	562193 Orang	168.657,900	618412 Orang	185.523,600	680253 Orang	204.075,900	680253 Orang	660.189,445
	20	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	2 paket	1 paket	125,357	1 Paket	135,834	-	-	-	-	-	-	2 Paket	261,191
	21	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	2 paket	1 paket	30,211	1 Paket	36,008	-	-	-	-	-	-	2 Paket	66,219

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	22	Pendampingan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah ("BLUD)	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang Mendapat Pelatihan BLUD	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	1 Paket			13 Pusk	280,367	13 Pusk	65,083	15 Pusk	82,607	15 Pusk	90,868	15 Pusk	518,925	
	23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	0,00		1 Paket	50,691	1 Paket	86,074	1 Paket	86,074	1 Paket	86,074	5 Paket	308,913		
	24	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 paket		1 Paket	608,610	1 Paket	669,471	1 Paket	736,418	1 Paket	810,060	1 Paket	2.824,559		
	25	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 paket		1 paket	6.210,268	1 paket	6.831,295	1 paket	7.514,424	1 paket	8.265,866	1 Paket	28.821,853		
	32	Dukungan manajemen penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan dan jampersal	Jumlah dana yang terealisasi pada bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal	Jumlah dana yang terealisasi pada bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal			1 paket	469,867	1 paket	516,854	1 paket	568,539	1 paket	625,393	1 Paket	2.180,654		
	26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah petugas yang dilatih kesehatan jiwa masyarakat	Jumlah petugas yang dilatih kesehatan jiwa masyarakat			13 orang	36,714		40,386		44,424		48,867		170,391		
	27	Lomba Puskesmas Berprestasi	Jumlah lomba puskesmas berprestasi	Jumlah lomba puskesmas berprestasi			1 Pusk	71,119	1 Pusk	78,319	1 Pusk	86,151	1 pusk	94,766	1 Pusk	330,355		
	28	Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat	Jumlah KK yang disurvei status kesehatannya	Jumlah KK yang disurvei status kesehatannya			103585 KK	306,761	25900 KK	337,370	466945 jiwa	299,917	466945 jiwa	329,909	629,827			
	29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibina	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibina	0,00		13 Pusk, 54 Pustu	210,995	0	-	0	-	0	-	13 pusk,54 pustu,78 kelompok	210,995		
	30	Pengadaan Peralatan Layanan P3K	Jumlah Peralatan Layanan P3K	Jumlah Peralatan Layanan P3K			1 paket	61,215										
	31	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional					2 sekolah	43,444										
	55	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	0	1 Paket	667,421								1 Paket	667,421		
	56	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	4.920,969								1 Paket	4.920,969		
	57	Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	0	1 Paket	83,065	0	-	0	-	0	-	0	1 Paket	83,065		
	58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun 2016	Jumlah pembayaran klaim JKKB manguwaras	Jumlah pembayaran klaim JKKB manguwaras	0	13 Puskesmas dan 2 RS	818,501	0	-	0	-	0	-	0	13 Puskesmas dan 2 RS	818,501		
	59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	jumlah kecamatan dengan kegiatan GEBYAR GERMAS Hidup Sehat	jumlah kecamatan dengan kegiatan GEBYAR GERMAS Hidup Sehat	0	6 Kecamatan (6440 Orang)	221,596	0	-	0	-	0	-	0	6 Kecamatan (6440 Orang)	221,596		
	60	Pengadaan pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung	Jumlah pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung yang dibeli	Jumlah pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung yang dibeli	0	30 Orang	15,463	0	-	0	-	0	-	0	30 orang	15,463		
	00	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	0,00	0	-	1 puskesmas	12,943	2 puskesmas workshop	28,475	1 puskesmas	12,943	17 puskesmas	54,362			
	00	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	KK Miskin	0	-	296 KK	85,884	266 KK	80,934	266 KK	80,934	266 KK	80,934	266 KK	247,752	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar (PelayanannKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit, PHBS)	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayanannKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit, PHBS)	36 Posyandu						12 Posyandu	952,039	12 Posyandu	1.047,242	12 Posyandu	1.151,966	108 Posyandu	3.151,247
0	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	90%						96%	4.304,123	98%	4.734,535	99%	5.207,989	99%	14.246,647
0	Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	80,16 %						84%	77,352	85%	85,087	86%	93,600	86%	256,039
0	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Prosentase siswa sehat	Prosentase siswa sehat	85%						93%	66,500	94%	72,500	95%	80,500	95%	219,500
00	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	369 sekolah						369 Sekolah	42,500	369 Sekolah	47,500	369 Sekolah	55,000	369 Sekolah	145,000
00	Lomba sekolah sehat Tingkat Nasional	Jumlah sekolah masuk katagori sekolah sehat tingkat Nasional	Jumlah sekolah sehat peringkat Nasional	0													0,000
00	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	0,00						1 paket	40,000	1paket	44,000	1 paket	50,000	3 Paket	134,000
00	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	0,00						1 paket	140,000	1 paket	145,000	1 paket	150,000	3 Paket	435,000
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk kali 100	100,00%	100,00%	1.295,021	100,00%	798,234	100,00%	878,057	100,00%	965,863	100,00%	1.062,449	100,00%	4.999,624	
01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	- Persentase balita kurus mendapat PMT	Jumlah balita kurus yang mendapat PMT dibagi Jumlah balita kurus yang ada kali 100	100%	80%	1.227,734	85%	798,234	85%	878,057	85%	965,863	85%	1.062,449	85%	4.932,337	
03	Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Gizi Seimbang dalam rangka Peningkatan Capaian Keluarga Sadar Gizi	- jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	- jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	240 kader	240 Orang	67,287	0		0		0		0		240 kader	67,287	
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM dibagi jumlah desa yang ada kali 100	0,21	58,25%	546,287	62,35%	696,428	65,40%	729,337	68,12%	770,871	0,68	804,458	68,12%	3.547,381	
		Persentase Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat dibagi seluruh Desa/Kelurahan x 100	19,35%	19,35%		29%		32,26%		38,71%		45,16%		45,16%		
01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	170,976	18 Desa/ Kelurahan	119,569	20 Desa/ Kelurahan	225,000	24 Desa/ Kelurahan	225,000	28 Desa/Kel	225,000	32 Desa/ Kelurahan	965,545	
02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Persentase TTU sehat	Jumlah TTU memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah sampel TTU yang diperiksa	94,6%	94,6%	190,231	95,0%	277,579	95,5%	305,337	96,0%	335,871	97,0%	369,458	97,0%	1.478,476	
03	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Persentase Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Jumlah Puskesmas dengan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibagi jumlah Puskesmas kali 100	0	100%	185,0799	100%	208,335	100%	199,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	1.012,415	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	04	Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Jumlah Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Jumlah Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	0	0	1 Dokumen	90,945	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	1 Dokumen	90,945	
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penanganan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi ditangani dibagi jumlah seluruh penderita hipertensi yang ditemukan	Tidak Tersedia Data	100%	32.338,41260	100%	50.045,97704	100%	62.927,28483	100%	68.297,50261	100%	74.608,26317	100%	288.217,44024	
		Cakupan penanganan penderita diabetes	Jumlah penderita yang ditangani dibagi jumlah penderita yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi seluruh masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan kali 100	Tidak Tersedia data	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah bayi 0-11 bulan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	Jumlah waktu untuk penyelidikan epidemiologi dari laporan KLB dibagi seluruh waktu untuk penyelidikan epidemiologi kali 100	24 Jam	10 Jam		8 Jam		7 Jam		6 Jam		5 Jam		5 Jam		
		Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	Jumlah penderita yang sembuh dibagi jumlah penderita yang diobati kali 100	94,32%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	Jumlah orang yang diperiksa dibagi jumlah orang yang berisiko yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data Lengkap	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit bersumber binatang sesuai standar	Jumlah penderita penyakit bersumber binatang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data Lengkap	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000 penduduk	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000 penduduk	634,60 per 100.000 pddk	275 per 100.000 pddk	21.966,032	250 per 100.000 pddk	28.054,881	225 per 100.000 pddk	30.860,369	200 per 100.000 pddk	33.946,406	200 per 100.000 pddk	37.341,047	200 per 100.000 pddk	152.168,736
	02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	7741	7922	1.010,655	10.380	12.882,217	10.484	12.883,706	10.589	14.172,077	10.695	15.589,284	100%	56.537,939
		Jumlah imunisasi anak sekolah (BIAS)	Jumlah imunisasi anak sekolah (BIAS)	24.306	24.552		24.798		25.045		25.296		25.549		125.240		
		Jumlah Kampanye Imunisasi JE	Jumlah Kampanye Imunisasi JE	0	0		148.644		0		0		0		148.644		
		Jumlah Kampanye Imunisasi MR	Jumlah Kampanye Imunisasi MR	0	0		148.644		0		0		0		148.644		
		Jumlah perempuan yang mendapatkan vaksinasi HPV	Jumlah perempuan yang mendapatkan vaksinasi HPV	2500	13.555		16.447		16.751		9.858		9.770		66381		
	03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	24 jam	20 jam	64,168	18 jam	77,325	16 jam	85,058	14 jam	93,564	12 jam	102,920	12 jam	423,035
	04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	62 Desa	62 Desa	2.558,383	62 Desa	2.066,189	62 Desa	2.272,808	62 Desa	2.500,089	62 Desa	2.750,098	62 Desa	12.147,567

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05	Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Persentase kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang mendapatkan penanganan sesuai SOP	Jumlah kasus gigitan yang ditangani sesuai SOP dibagi kasus gigitan Hewan Penular Rabies seluruhnya kali 100	100%	100%	2.503,756	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.503,756	
06	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	250 Orang	250 Orang	741,6181	3840 orang	3.027,453	250 Orang	3.330,199	250 Orang	3.663,219	250 Orang	4.029,541	1.250 Orang	14,792,030	
07	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pendampingan ODHA	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	6 Kecamatan	6 Kecamatan	3.123,172	6 Kecamatan	3.645,577	6 Kecamatan	4.010,135	6 Kecamatan	4.411,149	6 Kecamatan	4.852,264	6 Kecamatan	20,042,297	
07	Pelatihan Petugas Jumantik	Tertlatihnya petugas jumantik	Tertlatihnya petugas jumantik di Kabupaten Badung	36 Jumantik	0,00	-	36 Orang	220,139	634 Jumantik	242,153	537 Jumantik	266,368	537 Jumantik	293,005	537 Jumantik	1.021,664	
08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit saluran	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit saluran	0,00	0,00	-	100%	24,439	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100%	24,439	
09	Pelatihan petugas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah petugas surveilans dan imunisasi yang dilatih	Jumlah petugas surveilans dan imunisasi yang dilatih	0,00	0,00	-	60 orang	31,619	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 orang	31,619	
09	Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	Jumlah penduduk yang mendapat imunisasi JE	Jumlah penduduk yang mendapat imunisasi JE	0	144290 Orang	259,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144290 Orang	259,090	
10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	0	68 Orang	64,441	24 orang	16,136	0	17,750	0	19,525	0	21,477	68 Orang	139,330	
11	Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	0	90 Orang	47,097	0	0	0	0	0	0	0	0	90 Orang	47,097	
00	Pelaksanaan vaksinasi Khusus	Jumlah sasaran (WUS dan Siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi khusus/kanker serviks	Jumlah sasaran (WUS dan siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi khusus/kanker serviks	3.926 orang	-	-	-	18090 orang	9.225,107	10406 orang	9.225,107	11447 orang	9.628,628	39943 orang	28,078,842		
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	Jumlah Puskesmas terakreditasi dengan kategori madya dibagi seluruh puskesmas yang ada kali 100	0,00	92,30%	1.797,85136	92,30%	3.458,24044	100,0%	3.207,16112	100,0%	3.875,28583	100,0%	3.292,22566	100,0%	15.328,76760	
		Persentase Laporan Kesehatan lengkap, tepat dan akurat	Jumlah Laporan Puskesmas yang lengkap, akurat dan tepat waktu dibagi jumlah seluruh laporan puskesmas kali 100	89,7%	90%		100%		100%		100%		100%		100%		
01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Jumlah Pusk. Yang Melaksanakan Layanan UGD 24 Jam	Jumlah Pusk. Yang Melaksanakan Layanan UGD 24 Jam	13 Pusk													
01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	926 ijin kerja	1100 ijin kerja	114,416	1210 ijin kerja	221,700	1331 ijin kerja	243,870	1464 ijin kerja	268,257	1610 ijin kerja	295,083	6715 ijin kerja	1.143,327	
02	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT				12 sarana	11,020	13 sarana	12,122	14 sarana	13,334	15 sarana	14,668	54 sarana	51,144	
03	Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas mendapat pendampingan pasca akreditasi	Jumlah Puskesmas mendapat pendampingan pasca akreditasi				13 Puskesmas	541,212								541,212	
04	Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	0	16 SPA dan 400 Terapis	22,051	48 SPA dan 500 Terapis	119,254	48 SPA dan 300 Terapis	131,179	48 SPA dan 300 Terapis	144,297	48 SPA dan 300 Terapis	158,727	160 SPA dan 1800 Terapis	575,507	
05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah penggunaan aplikasi pelaporan kesehatan secara online	Jumlah penggunaan aplikasi pelaporan kesehatan secara online	0			70 Lokasi	1.834,337	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	6.911,539	
07	Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	0	12 puskesmas terakreditasi dasar	1.661,384					2 puskesmas terakreditasi paripurna	240,000			19 puskesmas terakreditasi paripurna	1.901,384	

di 2018 ada perubahan kode rekening dari 22.07 menjadi 22.06

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	00 Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	0	0	-	13 Puskesmas	540,637	12 puskesmas	798,501	1 puskesmas	72,000	13 puskesmas	878,351	13 puskesmas	3,432,490	
	00 Pelatihan Kursus-kursus Singkat / Pelatihan Workshop Penunjang Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Kursus singkat / Pelatihan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Kursus singkat / Pelatihan	0			13 Puskesmas	190,080	13 Puskesmas	209,088	15 Puskesmas	229,997	15 Puskesmas	252,996	15 Puskesmas	652,164	
	00 Reakreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan reaktreditasi puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan reaktreditasi puskesmas	0	0	-			1 Puskesmas	120,000	12 puskesmas	1,215	0		12 Puskesmas	120,000	
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah Pustu/BKIA, Puskesmas dan RS dibandingkan dengan jumlah penduduk Jumlah pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dibagi jumlah standar sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar kali 100	8.330 Penduduk	8.877 Penduduk	37.940	8.877 Penduduk	22.330	8.936 Penduduk	29.320	8.873 Penduduk	27.054	8.648 Penduduk	29.761	8.648 Penduduk	146.405	
	01 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	13 Puskesmas			13 Puskesmas	19.400,000	14 Puskesmas	21.340,000	14 Puskesmas	23.474,000	14 Puskesmas	25.821,400	14 Puskesmas	90.035,400	
	02 Pengadaan Ambulance/ Puskesmas Keliling (DAK Fiskal)						6 unit	2.930							6 unit	2.930,000	
	01 Pengadaan Mesin Incinerator dan IPAL	Jumlah incinerator yang di adakan	Jumlah incinerator yang di adakan	8 Paket	1 Paket	802,905	0	-	0	-	0	-	0	-	11 Paket	802,905	
	02 Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	39 unit	17 Unit	2.201,686			4 Unit	2.200,000	2 unit	1,300	2 unit	1,300	25 Unit	7.001,686	
	14 Pengadaan Genset dan perlengkapannya	Jumlah Genset dan perlengkapannya yang di adakan	Jumlah Genset dan perlengkapannya yang di adakan	13 Paket	2 Paket	800,790	0	-	0	-	0	-	0,000	-	2 Paket	800,790	
	15 Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	13 Puskesmas	15 Puskesmas	19.331,388									15 Puskesmas	19.331,388	
	17 Pengembangan Sistem informasi berbasis web dengan pengembangan Komunikasi Badung Sehat	Jumlah Siwaras yang dibeli	Jumlah Siwaras yang dibeli	0,00	1 Paket	942,513										942,513	
	24 Pengadaan alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan)	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	3 paket	7 Paket	12.000,784			0 Paket	-	0	0	0	0	0	12.000,784	
	25 Pengadaan food security kit	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	0,00	1 Paket	1.860,000			1 Paket	140,000	1 Paket	140,000	1 Paket	70,000	5 Paket	2.210,000	
	00 Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas pembantu yang memiliki alat kesehatan lengkap	54 Pustu	0	-			58 Pustu	2.000,000	60 Pustu	2.000,000	62 Pustu	2.500,000	62 Pustu	6.500,000	
	00 Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	0,00	0	-			1 unit	3.500,000	0	-	0,000	-	1 unit	3.500,000	
	00 Pengadaan Sanitarian kit	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	0,00	0	-			2 Paket	140,000	2 Paket	140,000	1 Paket	70,000	18 Paket	350,000	
28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif dibagi jumlah seluruh Fasilitas Kesehatan kali 100	11 Hari	5 Hari	41,900	4 Hari	51,562	3 Hari	61,716	3 Hari	67,638	2,5 Hari	70,012	2,5 Hari	292,829	
	01 Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	Jumlah pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	Jumlah pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	1 Paket	50 sarana	10,126	50 Sarana	11,360	56 sarana	12,496	62 sarana	13,745	68 sarana	15,120	75 sarana	62,846	
	02 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	6 Kecamatan	6 Kec	31,774	6 Kec	33,323	6 Kec	41,721	6 Kec	45,893	6 Kec	45,893	6 Kec	198,603	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	03 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan ijin praktek tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan ijin praktek tenaga kesehatan				300 orang	6.880	350 orang	7.500	375 orang	8.000	400 orang	9.000		31,380	
29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh balita kali 100	70%	100%	54,395	100%	112,319	100%	327,045	100%	347,567	100%	370,030	100%	1.211,355	
	01 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Jumlah Nakes yang dilatih MTBS	Jumlah Nakes yang dilatih MTBS	0 Orang	28 Org	54,395	28 Org	60,111	58 Org	122,934	58 Org	123,044	56 Org	123,055	228 Org	483,540	
	00 Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDDTKA)	jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	260 Orang	0	-	0	-	26 orang	60,111	26 Orang	66,122	26 Orang	72,734	78 Orang	198,968	
	00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai sarana APE sesuai standart	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai sarana APE sesuai standart	23 Paket	-	3 paket	52,208	18 paket	144	18 paket	158	18 paket	174	57 Paket	528,848		
30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut Mendapat Pelayanan Kesehatan dibagi seluruh penduduk usia lanjut kali 100	50,03%	54%	277,360	56%	252,112	58%	1.296,000	60%	1.740,000	60%	2.418,000	60%	5.983,472	
	01 Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Lansia Yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Lansia Yang mendapat pelayanan kesehatan	14300 orang	14300 orang	277,360	15470 orang	252,112	16250 org	1.296,000	16900 org	1.740,000	17.500 org	2.418,000	17.500 org	5.983,472	
31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah Tempat Pengelolaan makanan diperiksa kali 100	83%	-	-	-	-	87%	6,580	89%	7,238	92%	7,962	94%	21,781	
	01 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Persentase Tempat Pengelolaan makanan hasil produksi rumah tangga yang dibina dan diawasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah Tempat Pengelolaan makanan diperiksa kali 100	83%					87%	6,580	89%	7,238	92%	7,962	94%	21,781	
32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Jumlah Bumil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	93,69%	100%	2.519,620	100%	3.348,122	100%	3.682,934	100%	4.051,228	100%	4.456,351	100%	18.058,254	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	Jumlah seluruh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Faskes sesuai standar	95,73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	Jumlah seluruh bayi yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart	96,9%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	01 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Stempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Persentase kematian ibu yang diaudit	Jumlah kematian ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas) yang diaudit dibagi total kematian maternal (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas) x 100	100%	100%	488,100	100%	431,190	100%	474,309	100%	521,740	100%	573,914	100%	2.489,255	
	02 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Jumlah pelayanan peserta KB Aktif (CPR)	Jumlah pelayanan KB Aktif dibagi jumlah PUS pada tahun tersebut kali 100	75%	77%	66,450	79%	78,177	80%	85,995	82%	94,594	85%	104,054	85%	429,270	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Jumlah institusi yang diawasi	Jumlah institusi yang diawasi	150 institusi	89 institusi	308,673	89 institusi	343,140	89 institusi	377,454	89 institusi	415,200	89 institusi	456,720	89 institusi	1,901,187	
04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Jumlah Nakes yang dilatih Jumlah Nakes yang dilatih PONE Jumlah petugas kesehatan yang dilatih Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Jumlah Nakes yang dilatih PONE Jumlah petugas kesehatan yang dilatih Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal Jumlah petugas kesehatan (Bidan) di bagi total bidan yang ada di kali 100% Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	334 orang 134 Orang 148 orang 52 Orang 0	200 orang 24 org 74 orang 74 Org 28 orang	97,966 - - - 56 org	228 orang 24 Org 74 orang 74 Org 56 org	387,015 - - - -	228 orang 24 Org 74 orang 74 Org 0	425,717 - - - -	228 orang 24 Org 74 orang 74 Org 28 orang	468,288 - - - -	228 orang 24 Org 74 orang 74 Org 56 org	515,117 - - - -	1112 orang 24 Org 370 orang 74 Org 168 org	1,894,103	
05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC	620 bumil dan ibu nifas	620 bumil dan ibu nifas	1,337,089	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2,108,599	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2,319,459	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2,551,405	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2,806,545	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	11,123,097	
08	Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	148 orang	74 orang	67,881	0	-	0	-	0	-	0	-	444 orang	67,881	
11	Pelatihan APN Pelaksanaan AMP Penemuan dan pemantauan Ibu hamil risiko tinggi lintas sektor Pengadaan Bahan Penyuluhan	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN	52 Orang	74 Org	97,104	-	-	-	-	-	-	-	-	74 Org	97,104	
12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	0	28 orang	56,356	-	-	-	-	-	-	-	-	28 orang	56,356	
36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	Jumlah bahan penunjang medis yang ada dibagi jumlah kebutuhan bahan penunjang medis kali 100	100%	100%	9.806,366	100%	9.859,948	100%	8.985,039	100%	9.818,543	100%	10.735,397	100%	49.205,292	
01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	1 Paket	1 Paket	3.252,037	1 Paket	3.577,241	1 Paket	3.934,965	1 Paket	4.328,461	1 Paket	4.761,307	5 Paket	19,854,010	
02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	13 Puskesmas	6 Kecamatan	6.554,329	13 Puskesmas	6.282,707	13 Puskesmas	5.050,074	13 Puskesmas	5.490,082	13 Puskesmas	5.974,090	13 Puskesmas	29,351,282	
37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	Jumlah alat kesehatan dengan kondisi baik dibagi jumlah seluruh alat kesehatan yang ada kali 100	100%	100%	249,985	100%	758,492	100%	834,341	100%	917,776	100%	1.009,553	100%	3.770,147	
01	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	13 Pusk	13 Pusk	71,717	0%	0,000	0%	0,000	0	0,000	0	0,000	13 Pusk	71,717	
01	Pemeliharaan dan kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	-	-	-	13Pusk	758,492	13Pusk	834,341	13 Pusk	917,776	13 Pusk	1.009,553	13 Pusk	3.520,162	
02	Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan	13 Pusk	1 Paket	178,268	0%	0,000	0%	0,000	0	0,000	0	0,000	1 Paket	178,268	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung

dr. I Gede Putra Suteja

Pembina Utama Muda

NIP : 196004071987101001

Tabel 5.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7
02	URUSAN KESEHATAN				117.878,605	
	DINAS KESEHATAN				117.878,605	
01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD		8.883,709	Diskes
	Kegiatan :					
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 Bulan	1.245,220	Diskes
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional		182 Unit	93,940	Diskes
	07 Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan		1 Tahun	20,625	Diskes
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		2 Paket	311,959	Diskes
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		1 Tahun	198,121	Diskes
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2 Paket	45,981	Diskes
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar		744 Eksemplar	65,880	Diskes
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu		1 Tahun	38,136	Diskes
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Paket	150,000	Diskes
	22 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPT Dinas Kesehatan	Tersedianya jasa kebersihan		126 Orang	3.211,663	Diskes
	29 Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional		194 Unit	1.499,717	Diskes
	31 Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan		1 Tahun	1.611,944	Diskes
	35 Penyediaan dekorasi	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar		1 Paket	4,950	Diskes
	36 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Tersedianya sarana penunjang kegiatan lomba-lomba/kesenian		1 Tahun	14,980	Diskes
	37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap		8 Orang	229,810	Diskes
	52 Seleksi Penyediaan Tenaga Pelayanan Kesehatan Puskesmas Abiansemal I	tersedianya Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Abiansemal I		31 orang	94,721	Diskes
	54 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat		1 Paket	40,000	Diskes
	59 Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan Melalui Media Cetak	Tersedianya Pengumuman Lelang		4 Paket	6,062	Diskes
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang memadai		8.544,796	Diskes
	Kegiatan :					
	05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas		25 Unit	674,000	Diskes
	07 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan Kantor		1 Paket	4.334,418	Diskes
	09 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor		1 Paket	1.880,500	Diskes
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor		1 Tahun	412,500	Diskes
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operasional		182 Unit	624,626	Diskes

26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	111,000	Disket
28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	2 Paket	70,425	Disket
63	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Terlaksananya pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	1 Paket	110,000	Disket
75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket	98,740	Disket
76	Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan Website	Terlaksananya Pemeliharaan SIKDA dan website Dinas Kesehatan	2 paket	88,080	Disket
87	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Terlaksananya pemeliharaan Incinerator dan Mesin IPAL	6.90 Incinerator, IPAL	140,507	Disket
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	325,681	Disket
	Kegiatan :				
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Kegiatan	1 Tahun	265,100	Disket
05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan penyusunan Buku Profil Kesehatan	1 Dokumen	10,609	Disket
07	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 Dokumen	9,998	Disket
08	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terlaksananya penyusunan Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan	4 Dokumen	5,998	Disket
10	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas kesehatan	Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	1 Dokumen	8,929	Disket
12	Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey terhadap Kepuasan Masyarakat	1 kali	19,067	Disket
13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	1 Paket	5,980	Disket
15	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah peresepan obat generik -----X100 Jumlah seluruh resep	3.774,126	Disket
	Kegiatan :				
01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	13 Puskesmas, 54 Pustu	3.738,281	Disket
02	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Terlaksananya kualitas pengelolaan Obat	13 Puskesmas, 54 Pustu	35,845	Disket
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -----X100 Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja pada	39.383,807	Disket
	Kegiatan :				
01	Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya pembinaan peningkatan upaya kesehatan masyarakat di puskesmas/Pustu.	13 Puskesmas	12,624	Disket
02	Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Terselenggaranya pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	24 Sekolah	226,354	Disket
03	Pengembangan Desa Siaga	Terlaksananya pengembangan desa siaga	62 Desa/Kelurahan	20,789	Disket
04	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksanaan pembinaan Masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 Kader	87,785	Disket
05	Pembinaan Posyandu	Terlaksananya pembinaan Posyandu di 6 Kecamatan se Kab Badung	573 Pos	51,530	Disket

07	Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara (JKBM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Terlaksananya monitoring terhadap pelayanan kepada peserta JKBM, JKN dan JKKB Manguwaras	13 Puskesmas	22,034	Diskes
09	Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Terlaksananya vaksinasi kanker serviks di 10 SMU/SMK Negeri se-Kabupaten Badung	8269 Orang	15.529,249	Diskes
10	Penanggulangan Terhadap Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Terhadap Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	13 puskesmas	29,432	Diskes
11	Penyelenggaraan Administrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Terselenggaranya administrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung se - Kabupaten Badung	13 puskesmas	94,524	Diskes
12	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu (PKTP) Tingkat Sekolah di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan PKTP di sekolah	9 sekolah	16,822	Diskes
13	Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kecamatan se Kabupaten Badung	Terbinanya Posyandu Balita dan Lansia di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	824,497	Diskes
15	Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Terselenggaranya pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat	395829 jiwa	13.954,680	Diskes
16	Sosialisasi Kanker kepada Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi Kanker kepada masyarakat	600 Orang	36,912	Diskes
19	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penanggulangan dan Peredaran Gelao Narkoba	800 orang	71,781	Diskes
20	Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Terlaksananya penilaian lomba sekolah sehat, kantin sehat, Penilaian dokter kecil dan KKR	24 Sekolah	74,151	Diskes
22	Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD	Terselenggaranya pelatihan petugas kantin sehat sekolah dasar	50 orang	27,409	Diskes
23	Lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat kabupaten dan Provinsi	13 sekolah	174,006	Diskes
24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu	Tersedianya penunjang kinerja Kader dan Pengurus Posyandu	4584 Orang	1.651,624	Diskes
26	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	391,251	Diskes
27	Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	Terlaksananya Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	1460 Wanita Usia Subur (WUS)	1.131,146	Diskes
28	Pelatihan Tutor Sebaya KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS Di Sekolah	Terlatihnya pembina KSPAN dan Tutor Sebaya	30 orang	19,106	Diskes
29	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13 Puskesmas	169,749	Diskes
35	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja	13 Kelompok	43,901	Diskes
33	Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan mulut di Puskesmas	13 puskesmas	17,865	Diskes
34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Terlaksananya Penanggulangan Gangguan Kesehatan Jiwa Masyarakat	6 Puskesmas	22,809	Diskes
35	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Terlaksananya Sosialisasi dan Work Shop tentang Akreditasi Puskesmas	13 Pusk	77,661	Diskes
36	Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya Lomba KSPAN tingkat SMP dan SMA/SMK Kabupaten dan Provinsi	6 Kecamatan	77,602	Diskes
37	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	62 Desa/Kelurahan	25,822	Diskes
38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Tersedianya tambahan tenaga kesehatan untuk menunjang kualitas layanan	31 Orang	1.553,140	Diskes

17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah persepean obat generik ----- X100 Jumlah seluruh resep	85,230	Diskes
	Kegiatan :				
	02 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Obat di Apotek dan Toko Obat Swasta	95 Apotek dan Toko Obat	10,527	Diskes
	03 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga	87 TPM	74,703	Diskes
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan anak balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk ----- X100 Sammel balita	526,539	Diskes
	Kegiatan :				
	01 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terlaksananya intervensi terhadap balita kurang gizi dan pengamatan status gizi	76 Kasus	330,039	Diskes
	02 Pemantauan Perkembangan Keluarga Sadar Gizi	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Keluarga Sadar Gizi dan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada balita umur 6-24 bulan	1240 Keluarga	135,014	Diskes
	03 Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi PP ASI dan penggunaan garam beryodium	240 Orang	61,486	Diskes
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	Jumlah Rumah sehat ----- X100 Jumlah rumah yang diperiksa	301,560	Diskes
		Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat	Jumlah TTU memenuhi syarat kesehatan ----- X100 Jumlah TTU yang diperiksa		
	Kegiatan :				
	01 Kabupaten Sehat	Terselenggaranya Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	95,627	Diskes
	02 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat	248 Lokasi	205,933	Diskes
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA+	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- X100 Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	10.709,484	Diskes
	Kegiatan :				
	01 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Terlaksananya kegiatan pemberantasan dan pencegahan penyakit yang bersumber binatang	62 Desa	2.245,747	Diskes
	02 Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Tercapainya UCI desa	100 %	1.306,376	Diskes
	03 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Dilaksanakannya Penyelidikan Epidemiologi KLB < 24 jam pada desa yg mengalami KLB	30 Kasus	54,471	Diskes
	04 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Menular	3 Jenis Penyakit Menular	1.459,935	Diskes
	05 Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Rabies	6 Kecamatan	3.510,078	Diskes
	06 Penyuluhan dan Penyegaran Kader Tuberculosis	Terlayannya penderita Tuberculosis di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	696,602	Diskes
	07 Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	946,821	Diskes
	08 Pelaksanaan PIN Polio 2016 di Kabupaten Badung	-		489,454	Diskes

23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	Jumlah sarana kesehatan berijin	16.326,344	Diskes
	Kegiatan :		X100 Jumlah seluruh sarana kesehatan		
	01 Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas 24 jam	6 Puskesmas	2.330,746	Diskes
	02 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1000 Sertifikat	36,865	Diskes
	03 Konsultasi Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi ISO 9001:2008	Terlaksananya konsultasi pendampingan penerapan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008	7 Paket	1.768,947	Diskes
	04 Konsultasi Pendampingan dan Resertifikasi ISO 9001 : 2015	Terlaksananya Konsultasi Pendampingan dan Resertifikasi ISO 9001 : 2015	2 Paket	467,508	Diskes
	05 Konsultasi Pendampingan Penilaian Surveillance Audit ISO 9001 : 2008	Terlaksananya Konsultasi Pendampingan Penilaian Audit Surveillance ISO 9001 : 2008	4 Paket	346,332	Diskes
	06 Akreditasi Puskesmas		1 Puskesmas	92,348	Diskes
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/BKIA	Jumlah puskesmas/BKIA yang mendapat sarana lengkap	11.283,598	Diskes
	Kegiatan :		X100 Jumlah seluruh puskesmas/BKIA		
	01 Pengadaan Mesin Incinerator	Tersedianya sarana dan prasarana operasional pembakaran sampah medis	1 Paket	276,791	Diskes
	02 Pengadaan Mobil Ambulance	Tersedianya Mobil Ambulance	6 Unit	1.912,646	Diskes
	03 Rehab Tembok Penyengker dan Candi Bentar BKIA Abianbase Kuta	Terlaksananya kegiatan Rehab Tembok Penyengker dan Candi Bentar BKIA Abianbase Kuta	1 Paket	206,108	Diskes
	04 Rehab Ringan Gedung Pustu Cangu	Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Cangu	1 Paket	196,263	Diskes
	05 Rehab Ringan Gedung Pustu Kuwum	Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Kuwum	1 Paket	196,103	Diskes
	06 Rehab Ringan Gedung Pustu Cemagi	Terlaksananya Rehab Ringan Gedung Pustu Cemagi	1 Paket	196,148	Diskes
	07 Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran I	Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran I	1 Paket	81,514	Diskes
	08 Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran II	Terlaksananya Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran II	1 paket	196,249	Diskes
	09 Rehab Ringan Gedung Pustu Sobangan	Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Sobangan	1 paket	196,109	Diskes
	10 Rehab Ringan Gedung Pustu Pererenan	Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung Pustu Pererenan	1 paket	197,189	Diskes
	12 Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Payudara (Mobile)	-		7.001,457	Diskes
	13 Rehab Ringan Gedung UPT Puskesmas Kuta Selatan	Terlaksananya Pembuatan Kanopi Untuk UPT Dinas Kesehatan	3 paket	170,929	Diskes
	23 Penyediaan Alat Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan	1 Paket	456,092	Diskes
28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	Jumlah Praktek tenaga kesehatan berijin	37,684	Diskes
	Kegiatan :		X100 Jumlah tenaga kesehatan yang praktek		
	01 Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	40 sarana	5,891	Diskes
	02 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis di	6 Kecamatan	31,793	Diskes

29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian balita per 1.000 Balita	Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal	165,883	Diskes			
			-----X1.000 Jumlah					
			Kelahiran hidup					
	Kegiatan :							
	01 Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui Tingkat Kabupaten Badung	Terselenggaranya Lomba Balita Indonesia dan Lomba Ibu ASI di Tingkat Kabupaten	6 Kecamatan	36,890	Diskes			
	02 Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDDTKA)	Terselenggaranya pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA) bagi petugas kesehatan	26 orang	28,145	Diskes			
	04 Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Tersedianya Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	9 Paket	100,848	Diskes			
30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah lansia yang dibina mendapat pelayanan kesehatan	1.225,205	Diskes			
			-----X100					
			Jumlah Seluruh lansia					
	Kegiatan :							
	01 Pelayanan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia	210 Posyandu	1.225,205	Diskes			
32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	10.052,537	Diskes			
			-----X100.000					
			Jumlah kelahiran hidup					
		Kegiatan :						
		03 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak			6 kecamatan	312,483	Diskes
		04 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan manajemen Pelayanan KB			4 Kasus komplikasi KB	20,570	Diskes
		05 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Terlaksananya pembinaan petugas kesehatan dalam upaya penurunan AKI			93 Institusi Pemberi Layanan Kesehatan	292,763	Diskes
		06 Lomba Bidan Delima Berprestasi	Terlaksananya Lomba Bidan Delima Berprestasi			6 Kecamatan	21,162	Diskes
		07 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Kasus Obstetri dan Neonatal	Terlaksananya pelatihan penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di Tingkat pelayanan dasar			20 orang	55,506	Diskes
		08 Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Terlaksananya pelatihan penanganan kasus obstetri dan perinatal			74 orang	59,386	Diskes
	10 Jaminan Persalinan (Jampersal)		4718 Ibu hamil	3.287,623	Diskes			
36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	Seluruh puskesmas mendapat pengadaan bahan penunjang medis	6.003,044	Diskes			
	Kegiatan :							
	01 Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	13 Puskesmas, 54 Pustu	2.136,121	Diskes			
	02 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas dan Pustu	6 Kecamatan	3.866,923	Diskes			
37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah alkes puskesmas yang	Seluruh alkes puskesmas terpelihara	249,378	Diskes			
	Kegiatan :							
	01 Pemeliharaan Alat Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan	13 Puskesmas, 54 Pustu	72,261	Diskes			
	02 Kalibrasi Alat Kesehatan	-		177,117	Diskes			
JUMLAH								

Tabel 5.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	URUSAN WAJIB																
02	URUSAN KESEHATAN					236.719,246		354.062,937		519.225,703		566.068,747		620.520,083		2.249.862,940	
	DINAS KESEHATAN					236.719,246		354.062,937		519.225,703		566.068,747		620.520,083		2.249.862,940	
	11 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah puskesmas yang ada kali 100	78,70%	100%	3.810,502	100%	4.083,917	100%	4.329,341	100%	4.199,341	100%	4.205,841	100%	20.628,941	
	01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah puskesmas yang ada kali 100	78,70%	100%	3.743,119	100%	4.042,206	100%	4.134,341	100%	4.134,341	100%	4.134,341	100%	20.188,347	
	02 Optimalisasi Pengelolaan Obat	Jumlah pendistribusian obat ke Puskesmas	Jumlah pendistribusian obat ke Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	67,383	15 Puskesmas	41,711	17 Puskesmas	195,000	18 Puskesmas	65,000	18 Puskesmas	71,500	18 Puskesmas	440,594	
	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	70,97%	80%	145.952,532	90%	258.120,756	100%	396.521,977	100%	437.236,883	100%	480.334,485	100%	1.671.734,856	
		Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Indeks Keluarga Sehat yang bernilai 1 dibagi 12 - Jumlah seluruh keluarga yang ada kali 100	Tidak Tersedia Data	0,5		0,6		0,7		0,75		0,8		0,8		
		Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	46,15%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat ditangani dibagi jumlah orang dengan gangguan jiwa berat kali 100	62,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	01 Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	106,695	1 Pusk. 1 Pustu dan 9 Nakes	103,958							15 Pusk. 15 Pustu dan 78 Nakes	210,652	
	02 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Jumlah Sekolah Predikat Sehat Tk. Provinsi	Jumlah Sekolah Predikat Sehat Tk. Provinsi	4 sekolah	4 sekolah	241,853	3 sekolah	60,674						16 sekolah	302,528		
	04 Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	80,16 %	82%	63,920	84%	49,889						90%	113,809		
	05 Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	96%	96%		97%	3.912,839						99%	3.912,839		
	05 Pembinaan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	95,11	96,00%	89,009	0,00%	-					-	98,00%	89,009		
	06 Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	150 kader	150 kader	55,798								700 Kader	55,798		
	09 Peningkatan Penanggulangan kanker serviks dan payudara	Jumlah perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	657 orang		18.271,801								42867 orang	18.271,801		

10	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan mata	Jumlah kasus gangguan kesehatan mata dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	13 Puskesmas	1,65%	48,150	1,7%	49,851	1,7%	58,261	1,75%	64,087	1,8%	70,496	1,8%	290,845
12	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	9 sekolah	9 sekolah	150,579	2 sekolah	381,204	9 sekolah	419,324	9 sekolah	461,257	9 sekolah	507,383	9 sekolah	1,919,747
13	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar ; (PelayananKes. Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar ; (PelayananKes. Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	60 Posyandu	12 Posyandu	851,604	12 Posyandu	906,392						120 Posyandu		1,757,997
16	Sosialisasi dan kepedulian Kanker kepada Masyarakat	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	600 orang	600 orang	80,259										
19	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah msyarakat yang disosialisasi dan dilakukan tes Urine	Jumlah sekolah/kelompok masyarakat yang dilakukan tes Urine	16 Sekolah	1000 orang	102,008	4000 orang	415,514	4000 orang	380,900	4000 orang	418,990	4000 orang	460,889	17000 orang	1,778,302
20	Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Jumlah sekolah yang dilombakan	Jumlah sekolah yang dilombakan	108 Sekolah	4 Sekolah	56,996	0	0	0	0	0	0	0	20 Sekolah	0	56,996
22	Pelatihan Petugas Kantin Sehat	Jumlah penjamah/penge	Jumlah	250 Orang	50 Orang	32,012	0	0	0	0	0	0	0	550 orang	0	32,012
24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang mendapat upah kerja	Jumlah kader posyandu yang mendapat upah kerja	2.865 orang	2.735 org	2.965,983	0	0	0	0	0	0	0	2.790 orang	0	2.965,983
26	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	5134	10000 orang	425,313	10000 orang	559,245	10000 orang	615,168	10000 orang	676,686	10000 orang	744,355	10000 orang	3,020,768
27	Peningkatan Penanggulangan Kanker	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	1200 WUS	3360 WUS	2,025,232	3360 WUS	3,658,932	4320 WUS	4,024,825	4800 WUS	4,427,308	4800 WUS	4,870,038	21120 WUS	19,006,335
28	Pelatihan Guru Pembina KSPAN dan Sosialisasi HIV AIDS di Sekolah	Persentase siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS	Jumlah siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS dibagi jumlah seluruh siswa kali 100	3%	9%	92,083	0	0	0	0	0	0	0	21%	0	92,083
31	Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	12 Sekolah	12 Sekolah	78,853	0	0	0	0	0	0	0	84 sekolah	0	78,853
32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	4 Pos UKK	6 Pos UKK	39,259	0	0	6 Pos UKK	39,259	6 Pos UKK	39,259	6 Pos UKK	39,259	24 Pos UKK	157,037
33	Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut dibagi Jumlah seluruh penduduk kali 100	3,4%	4,40%	21,413	3,80%	15,8	4,00%	17,4	4,2%	19,1	4,4%	21,1	4,6%	94,860
34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan gangguan kesehatan jiwa yang ditangani dibagi jumlah orang gangguan jiwa	130 orang	130 orang	84,858	150 orang	200,686	170 orang	220,755	190 orang	242,830	210 orang	267,113	210 orang	1,016,243
36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	12 Sekolah	12 Sekolah	61,717	0	0	0	0	0	0	0	84 sekolah	0	61,717
38	Peningkatan kualitas layanan puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	1 Paket	211Orang	5,771,846								211Orang		5,771,846
39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	0,00	1 Paket	86,074	0	0	0	0	0	0	0	5 Paket	0	86,074

40	Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	Jumlah penduduk yang mendapat Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	Jumlah penduduk yang mendapat Layanan jaminan kesehatan krama badung sehat (KBS)	0,00	46422 Orang	92.171,400	474558 orang	101.932,045	562193 Orang	168.657,900	618412 Orang	185.523,600	680253 Orang	204.075,900	680253 Orang	752.360,845
42	Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang Mendapat Pelatihan BLUD	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	1 Paket	46 orang	207,000	0	0	0	0	0	0	0	15 Pusk	207,000	
43	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kel.	Jumlah Desa/kel yang mendapat pelayanan kesehatan keliling	Jumlah Desa/kel yang mendapat pelayanan kesehatan keliling	-	62 desa/kel	13.112,744	62 desa/kel	15.718	62 desa/kel	17.227	62 desa/kel	20.673	62 desa/kel	22.740	62 desa/kel	89.470,081
44	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah desa yang mendapatkan Sosialisasi Jaminan Krama Badung Sehat	Jumlah desa yang mendapatkan Sosialisasi Jaminan Krama Badung Sehat	0	62 Desa/573 banjar	154,829	0	0	0	0	0	0	0	62 Desa/573 banjar	154,829	
45	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	0	369 Sekolah	175,820	369 Sekolah	37,495	0	0	0	0	0	369 Sekolah	213,315	
46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah pengelola Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah pengelola Kesehatan Krama Badung Sehat	0	18 Orang	571,928	0	0	0	0	0	0	0	18 Orang	571,928	
47	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	0,00	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Paket	0,000	
48	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	0,00	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Paket	0,000	
50	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	1 klinik	6 klinik	21,270	1 klinik	30,3	1 klinik	33,3	1 klinik	36,6	1 klinik	40,3	1 klinik	161,795
51	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	0	50 Penyehat	32,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Monitoring layanan Krama Badung Sehat	Jumlah faskes yang dimonitor pelaksana layanan Krama Badung Sehat	Jumlah faskes yang dimonitor pelaksana layanan Krama Badung Sehat	0	73FKTP/4 FKTL	93,374	0	0	0	0	0	0	0	121 FKTP/7 FKTL	93,374	
53	Peningkatan pelayanan puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	3 Pusk.	3 Pusk.	205,441	0	0	0	0	0	0	0	3 Pusk.	205,441	
54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah pendistribusian kartu dan pemantauan kartu badung sehat	Jumlah pendistribusian kartu dan pemantauan kartu badung sehat	0	464222	520,273	0	562193	132,773	618412	132,773	680253	132,773	680253	918,590	
16	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	0	0	0	60 Penyehat	214,224	0	0	0	0	0	60 Penyehat	214,224	
17	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada	Jumlah kader pramuka mendapat pembinaan saka bakti husada	Jumlah kader pramuka mendapat pembinaan saka bakti husada	0	0	0	30 orang	69,259	30 orang	75,488	30 orang	83,036	30 orang	91,339	120 orang	319,122
18	Peningkatan Kualitas pelayanan puskesmas	Jumlah Puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap	0	0	0	13 Pusk.	19.206,683	13 Pusk.	21.127,351	13 Pusk.	23.240,086	13Pusk.	25.564,095	13 Pusk.	28.120,505
19	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan KBS	Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan KBS	0,00	0	0	474558 jiwa	101.932,045	562193 Orang	168.657,900	618412 Orang	185.523,600	680253 Orang	204.075,900	680253 Orang	660.189,445
20	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	2 paket	1 paket	125,357	1 Paket	135,834	0	0	0	0	0	2 Paket	261,191	
21	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	2 paket	1 paket	30,211	1 Paket	36,008	0	0	0	0	0	2 Paket	66,219	
22	Pendampingan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah ("BLUD)	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang Mendapat Pelatihan BLUD	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	1 Paket	0	0	13 Pusk	280,367	13 Pusk	65,083	15 Pusk	82,607	15 Pusk	90,868	15 Pusk	518,925
23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	Jumlah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	0,00	0	0	1 Paket	50,691	1 Paket	86,074	1 Paket	86,074	1 Paket	86,074	5 Paket	308,913
24	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 paket	0	0	1 Paket	608,610	1 Paket	669,471	1 Paket	736,418	1 Paket	810,060	1 Paket	2.824,559
25	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 paket	0	0	1 paket	6.210,268	1 paket	6.831,295	1 paket	7.514,424	1 paket	8.265,866	1 Paket	28.821,853

32	Dukungan manajemen penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan dan jampersal	Jumlah dana yang terealisasi pada bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal	Jumlah dana yang terealisasi pada bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal			1 paket	469,867	1 paket	516,854	1 paket	568,539	1 paket	625,393	1 Paket	2,180,654	
26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah petugas yang dilatih kesehatan jiwa masyarakat	Jumlah petugas yang dilatih kesehatan jiwa masyarakat			13 orang	36,714		40,386		44,424		48,867		170,391	
27	Lomba Puskesmas Berprestasi	Jumlah lomba puskesmas berprestasi	Jumlah lomba puskesmas berprestasi			1 Pusk	71,119	1 Pusk	78,319	1 Pusk	86,151	1 pusk	94,766	1 Pusk	330,355	
28	Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat	Jumlah KK yang disurvei status kesehatannya Jumlah masyarakat yang terlayani dan tertanggulangi masalah kesehatannya	Jumlah KK yang disurvei status kesehatannya Jumlah masyarakat yang terlayani dan tertanggulangi masalah kesehatannya			103585 KK	306,761	25900 KK	337,370	466945 jiwa	299,917	466945 jiwa	329,909		629,827	
29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibina	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibina	0,00		13 Pusk. 54 Pustu	210,995	0		0	0	0		13 pusk.54 pustu,76 kelompok	210,995	
30	Pengadaan Peralatan Layanan P3K	Jumlah Peralatan Layanan P3K	Jumlah Peralatan Layanan P3K			1 paket	61,215									
31	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional					2 sekolah	43,444									
55	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	0	1 Paket		667,421							1 Paket	667,421	
56	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 Paket	1 Paket		4,920,969							1 Paket	4,920,969	
57	Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	0	1 Paket		83,065	0	0	0	0	0	0	1 Paket	83,065	
58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun 2016	Jumlah pembayaran klaim JKKB manguwaras	Jumlah pembayaran klaim JKKB manguwaras	0	13 Puskesmas dan 2 RS		818,501	0	0	0	0	0	0	13 Puskesmas dan 2 RS	818,501	
59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	jumlah kecamatan dengan kegiatan GEBYAR GERMAS Hidup Sehat	jumlah kecamatan dengan kegiatan GEBYAR GERMAS Hidup Sehat	0	6 Kecamatan (6440 Orang)		221,596	0	0	0	0	0	0	6 Kecamatan (6440 Orang)	221,596	
60	Pengadaan pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung	Jumlah pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung yang dibeli	Jumlah pakaian seragam pengurus Saka Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung yang dibeli	0	30 Orang		15,463	0	0	0	0	0	0	30 orang	15,463	
00	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dari workshop akreditasi	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	0,00	0			1 puskesmas	12,943	2 puskesmas workshop	28,475	1 puskesmas	12,943	17 puskesmas	54,362	
00	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan		KK Miskin	0			296 KK	85,884	266 KK	80,934	266 KK	80,934	266 KK	247,752
00	Pembinaan kepatuhan terhadap Perda KTR	Cakupan Tatanan/Obyek KTR yang patuh terhadap PERDA KTR	Jumlah Tatanan/Obyek KTR yang patuh terhadap PERDA KTR dibagi jumlah seluruh Tatanan/Obyek KTR kali 100	30%	0			32%	20,000	35%	22,000	38%	24,200	38%	66,200	
00	Operasional mobil Promosi Kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan kesehatan		20 desa			62 desa	83,200	62 desa	91,400	62 dsa	100,500	62 desa	275,100	
00	Pelayanan dokter spesialis (residen) di Puskesmas Rawat Inap	Jumlah dokter spesialis (residen) Kandungan dan Anak memberi pelayanan di Puskesmas rawat inap	Jumlah dokter spesialis (residen) memberi pelayanan di Puskesmas rawat inap		0			6 Paket	720,000	6 Paket	720,000	6 Paket	720,000	6 Paket	2,160,000	

	00	Media Promosi Kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media promosi kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media promosi kesehatan	62 desa				62 desa	99,875	62 desa	110,350	62 desa	122,650	62 desa	332,875	
	00	Peningkatan Kapasitas Badan Layanan Umum daerah (BLUD) di Puskesmas	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	Jumlah Tenaga Dinas dan Puskesmas yang mendapat Pelatihan BLUD	0	13 Pusk	144,000	13 Pusk	158,400	15 Pusk	174,240	15 Pusk	191,664	15 Pusk	668,304		
	00	Operasional mobil Klinik Keliling	Jumlah Paket operasional mobil klinik keliling	Jumlah Paket operasional mobil klinik keliling	0			6 Paket	5.029,068	6 Paket	5.029,068	6 Paket	5.029,068	6 Paket	15.087,204		
	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	Jumlah Sarana Kesehatan dan toko obat yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar dibagi seluruh sarana kesehatan dan toko obat kali 100	100%	100%	88,948	100%	146,829	100%	28,634	100%	28,634	100%	28,634	100%	321,678
	01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	100%	100%	11,597	100%	81,026	100%	28,634	100%	28,634	100%	28,634	100%	178,525
	03	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan ha produksi RT	Persentase Tempat Pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah Tempat Pengelolaan makanan diperiksa kali 100	83%	83%	77,350	85%	65,803					94%	143,153		
	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Penyehat Tradisional yang menerapkan kaidah kesehatan	Jumlah Penyehat Tradisional yang menerapkan kaidah kesehatan dibagi seluruh Penyehat Tadisional kali 100	Tidak Ada Data	25%	-	50%	-	75%	467,741	100,0%	514,514	100%	565,967	100%	1.548,222
	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional	Jumlah Pengobatan Tradisional yang dibina dan diawasi	Jumlah Pengobatan Tradisional yang dibina dan diawasi	0			60 Penyehat	235,647	60 Penyehat	259,211	60 Penyehat	285,133	240 penyehat	779,991		
	0	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Jumlah puskesmas dan kelompok Toga yang dibina	Jumlah puskesmas dan kelompok yang dibina	0,00			13 pus, 26 kelompok	232,094	13 pus,26 kelompok	255,303	13 pus,26 kelompok	280,834	13 pus,78 kelompok	768,231		
	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kemandirian Posyandu Purnama dan Mandiri	Jumlah Posyandu purnama dan mandiri dibagi seluruh posyandu yang ada kali 100	95%	99%		99%	5.622,514	99%	6.175,864	99%	6.789,055	99%	18.587,433		
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat dibagi Jumlah rumah tangga sesuai sampel kali 100	80.16 %	82%		83%		84%	85%		86%	86%			
			Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	Jumlah siswa sekolah dasar dan setingkat mendapat pelayanan kesehatan dibagi jumlah seluruh siswa ekolah dasar dan setingkat kali 100	100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%			
	0	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayananKes. Lanjut Usia, BKS, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayananKes. Lanjut Usia, BKS, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	36 Posyandu			12 Posyandu	952,038	12 Posyandu	1.047,242	12 Posyandu	1.151,968	108 Posyandu	3.151,247		
	0	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	90%			96%	4.304,123	98%	4.734,535	99%	5.207,989	99%	14.246,647		

	0	Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	80,16 %				84%	77,352	85%	85,087	86%	93,600	86%	256,039	
	0	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Prosentase siswa sehat	Prosentase siswa sehat	85%				93%	66,500	94%	72,500	95%	80,500	95%	219,500	
	00	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjarangan	Jumlah Sekolah melakukan penjarangan	369 sekolah				369 Sekolah	42,500	369 Sekolah	47,500	369 Sekolah	55,000	369 Sekolah	145,000	
	00	Lomba sekolah sehat Tingkat Nasional	Jumlah sekolah masuk katagori sekolah sehat tingkat Nasional	Jumlah sekolah sehat peringkat Nasional	0											0,000	
	00	Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pameran Promosi kesehatan masyarakat	0,00				1 paket	40,000	1paket	44,000	1 paket	50,000	3 Paket	134,000	
	00	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan HKN	Jumlah kegiatan HKN	0,00				1 paket	140,000	1 paket	145,000	1 paket	150,000	3 Paket	435,000	
	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk kali 100	100,00%	100,00%	1.295,021	100,00%	798,234	100,00%	878,057	100,00%	965,863	100,00%	1.062,449	100,00%	4.999,624
	01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Persentase balita kurus mendapat PMT	Jumlah balita kurus yang mendapat PMT dibagi Jumlah balita kurus yang ada kali 100	100%	80%	1.227,734	85%	798,234	85%	878,057	85%	965,863	85%	1.062,449	85%	4.932,337
	03	Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Gizi Seimbang dalam rangka Peningkatan Capaian Keluarga Sadar Gizi	Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	240 kader	240 Orang	67,287	0	0	0	0	0	0	240 kader	67,287		
	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM dibagi jumlah desa yang ada kali 100	0,21	58,25%	546,287	62,35%	696,428	65,40%	729,337	68,12%	770,871	0,68	804,458	68,12%	3.547,381
			Persentase Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat dibagi seluruh Desa/Kelurahan x 100	19,35%	19,35%		29%		32,26%		38,71%	45,16%		45,16%		
	01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	170,976	18 Desa/ Kelurahan	119,569	20 Desa/ Kelurahan	225,000	24 Desa/ Kelurahan	225,000	28 Desa/Ke	225,000	32 Desa/ Kelurahan	965,545
	02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyelamatan Lingkungan Pemukiman	Persentase TTU sehat	Jumlah TTU memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah sampel TTU yang diperiksa	94,6%	94,6%	190,231	95,0%	277,579	95,5%	305,337	96,0%	335,871	97,0%	369,458	97,0%	1.478,476
	03	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Persentase Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Jumlah Puskesmas dengan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibagi jumlah Puskesmas kali 100	0	100%	185,0799	100%	208,335	100%	199,000	100%	210,000	100%	210,000	100%	1.012,415
	04	Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Jumlah Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Jumlah Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	0	0	0	1 Dokumen	90,945	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	1 Dokumen	90,945
	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penanganan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi ditangani dibagi jumlah seluruh penderita hipertensi yang ditemukan	Tidak Tersedia Data	100%	32.338,41260	100%	50.045,97704	100%	62.927,28483	100%	68.297,50261	100%	74.608,26317	100%	288.217,44024
			Cakupan penanganan penderita diabetes	Jumlah penderita yang ditangani dibagi jumlah penderita yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data	100%		100%		100%		100%	100%		100%		

			Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi seluruh masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan kali 100	Tidak Tersedia data	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah bayi 0-11 bulan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	Jumlah waktu untuk penyelidikan epidemiologi dari laporan KLB dibagi seluruh waktu untuk Penyelidikan epidemiologi kali 100	24 Jam	10 Jam		8 Jam		7 Jam		6 Jam		5 Jam		5 Jam		
			Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	Jumlah penderita yang sembuh dibagi jumlah penderita yang diobati kali 100	94,32%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	Jumlah orang yang diperiksa dibagi jumlah orang yang berisiko yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data Lengkap	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit bersumber binatang sesuai standar	Jumlah penderita penyakit bersumber binatang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita yang ditemukan kali 100	Tidak Tersedia Data Lengkap	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
		01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000 penduduk	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000 penduduk	634,60 per 100.000 pddk	275 per 100.000 pddk	21.966,032	250 per 100.000 pddk	28.054,881	225 per 100.000 pddk	30.860,368	200 per 100.000 pddk	33.946,406	200 per 100.000 pddk	37.341,047	200 per 100.000 pddk	152.168,736
		02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	7741	7922	1.010,655	10.380	12.882,217	10.484	12.883,706	10.589	14.172,077	10.695	15.589,284	100%	56.537,939
			Jumlah imunisasi anak sekolah (BIAS)	Jumlah imunisasi anak sekolah (BIAS)	24.306	24.552		24.798		25.045		25.296		25.549		125.240		
			Jumlah Kampanye Imunisasi JE	Jumlah Kampanye Imunisasi JE	0	0		148.644		0		0		0		148.644		
			Jumlah Kampanye Imunisasi MR	Jumlah Kampanye Imunisasi MR	0	0		148.644		0		0		0		148.644		
			Jumlah perempuan yang mendapatkan vaksinasi HPV	Jumlah perempuan yang mendapatkan vaksinasi HPV	2500	13.555		16.447		16.751		9.858		9.770		66381		
		03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	24 jam	20 jam	64,168	18 jam	77,325	16 jam	85,058	14 jam	93,564	12 jam	102,920	12 jam	423,035
		04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	62 Desa	62 Desa	2.558,383	62 Desa	2.066,185	62 Desa	2.272,808	62 Desa	2.500,089	62 Desa	2.750,098	62 Desa	12.147,567
		05	Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Persentase kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang mendapatkan penanganan sesuai SOP	Jumlah kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang mendapat penanganan sesuai SOP dibagi kasus gigitan Hewan Penular Rabies seluruhnya kali 100	100%	100%	2.503,756	0%		0%		0%		0%		100%	2.503,756
		06	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	250 Orang	250 Orang	741,6181	3840 orang	3.027,453	250 Orang	3.330,195	250 Orang	3.663,219	250 Orang	4.029,541	1.250 Orang	14.792,030

	07	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pendampingan ODHA	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	6 Kecamatan	6 Kecamatan	3.123,172	6 Kecamatan	3.645,577	6 Kecamatan	4.010,138	6 Kecamatan	4.411,149	6 Kecamatan	4.852,264	6 Kecamatan	20.042,297	di 2018 ada perubahan kode rekening dari 22.07 menjadi 22.06
	07	Pelatihan Petugas Jumantik	Terlatihnya petugas jumantik	Terlatihnya petugas jumantik di Kabupaten Badung	36 Jumantik	0,00	-	36 Orang	220,138	634 Jumantik	242,153	537 Jumantik	266,368	537 Jumantik	293,008	537 Jumantik	1.021,664	
	08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit saluran	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit saluran	0,00	0,00	-	100%	24,439	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100%	24,439	
	09	Pelatihan petugas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah petugas surveilans dan imunisasi yang dilatih	Jumlah petugas surveilans dan imunisasi yang dilatih	0,00	0,00	-	60 orang	31,619	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 orang	31,619	
	09	Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	Jumlah penduduk yang mendapat imunisasi JE	Jumlah penduduk yang mendapat imunisasi JE	0	144290 Orang	259,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144290 Orang	259,090	
	10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	0	68 Orang	64,441	24 orang	16,136	0	17,750	0	19,525	0	21,477	68 Orang	139,330	
	11	Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	Jumlah Petugas yang mendapat pelatihan	0	90 Orang	47,097	0	0	0	0	0	0	0	0	90 Orang	47,097	
	00	Pelaksanaan vaksinasi Khusus	Jumlah sasaran (WUS dan Siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi khusus/kanker serviks	Jumlah sasaran (WUS dan Siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi khusus/kanker serviks	3.926 orang	-	-	-	18090 orang	-	9.225,107	10406 orang	9.225,107	11447 orang	9.628,628	39943 orang	28.078,842	
	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	Jumlah Puskesmas terakreditasi dengan kategori madya dibagi seluruh Puskesmas yang ada kali 100	0,00	92,30%	1.797,85136	92,30%	3.458,24044	100,0%	3.207,16112	100,0%	3.875,28583	100,0%	3.292,22566	100,0%	15.328,76760	
			Persentase Laporan Kesehatan lengkap, tepat dan akurat	Jumlah Laporan Puskesmas yang lengkap, akurat dan tepat waktu dibagi jumlah seluruh laporan Puskesmas kali 100	89,7%	90%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
	01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Jumlah Pusk. Yang Melaksanakan Layanan UGD 24 Jam	Jumlah Pusk. Yang Melaksanakan Layanan UGD 24 Jam	13 Pusk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Kesehatan	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	926 ijin kerja	1100 ijin kerja	114,416	1210 ijin kerja	221,700	1331 ijin kerja	243,870	1464 ijin kerja	268,257	1610 ijin kerja	295,083	6715 ijin kerja	1.143,327	
	02	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	-	-	-	12 sarana	11,020	13 sarana	12,122	14 sarana	13,334	15 sarana	14,668	54 sarana	51,144	
	03	Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas mendapat pendampingan pasca akreditasi	Jumlah Puskesmas mendapat pendampingan pasca akreditasi	-	-	-	13 Puskesmas	541,212	-	-	-	-	-	-	-	541,212	
	04	Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	Jumlah penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	0	16 SPA dan 400 Terapis	22,051	48 SPA dan 500 Terapis	119,254	48 SPA dan 300 Terapis	131,178	48 SPA dan 300 Terapis	144,297	48 SPA dan 300 Terapis	158,727	160 SPA dan 1800 Terapis	575,507	
	05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah penggunaan aplikasi pelaporan kesehatan secara online	Jumlah penggunaan aplikasi pelaporan kesehatan secara online	0	-	-	70 Lokasi	1.834,337	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	1.692,401	70 Lokasi	6.911,539	
	07	Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	0	12 puskesmas terakreditasi dasar	1.661,384	-	-	-	2 puskesmas terakreditasi paripurna	240,000	-	-	19 puskesmas terakreditasi paripurna	1.901,384		
	00	Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	0	-	-	13 Puskesmas	540,637	12 puskesmas	798,501	1 puskesmas	72,000	13 puskesmas	878,351	13 puskesmas	3.432,490	
	00	Pelatihan Kursus-kursus Singkat / Pelatihan Workshop Penunjang Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Kursus singkat / Pelatihan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Kursus singkat / Pelatihan	0	-	-	13 Puskesmas	190,080	13 Pusk	209,088	15 Pusk	229,997	15 Pusk	252,996	15 Pusk	652,164	
	00	Reakreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan reaktreditasi puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan reaktreditasi puskesmas	0	-	-	-	-	1 Pusk	120,000	12 puskesmas	1.215	0	12 Pusk	120,000		

	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pustu/BKIA, Puskesmas dan RS dibandingkan dengan jumlah penduduk	8.330 Penduduk	8.877 Penduduk	37.940	8.877 Penduduk	22.330	8.936 Penduduk	29.320	8.873 Penduduk	27.054	8.648 Penduduk	29.761	8.648 Penduduk	146.405
			Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dibagi jumlah standar sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar kali 100	65%	65%		65%		75%		80%		85%		85%	
	01	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	13 Puskesmas			13 Puskesmas	19.400,000	14 Puskesmas	21.340,000	14 Puskesmas	23.474,000	14 Puskesmas	25.821,400	14 Puskesmas	90.035,400
	02	Pengadaan Ambulance/ Puskesmas Keliling (DAK Fisik)						6 unit	2.930,000							6 unit	2.930,000
	01	Pengadaan Mesin Incinerator dan IPA	Jumlah incinerator yang di adakan	Jumlah incinerator yang di adakan	8 Paket	1 Paket	802,905	0	-	0	-	0	0	0		11 Paket	802,905
	02	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	39 unit	17 Unit	2.201,686			4 Unit	2.200,000	2 unit	1.300	2 unit	1.300	25 Unit	7.001,686
	14	Pengadaan Genset dan perlengkapannya	Jumlah Genset dan perlengkapannya yang di adakan	Jumlah Genset dan perlengkapannya yang di adakan	13 Paket	2 Paket	800,790			0	-	0	-	0,000	-	2 Paket	800,790
	15	Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	13 Puskesmas	15 Puskesmas	19.331,388									15 Puskesmas	19.331,388
	17	Pengembangan Sistem informasi berbasis web dengan pengembangan Komunikasi Badung Sehat	Jumlah Siwaras yang dibeli	Jumlah Siwaras yang dibeli	0,00	1 Paket	942,513										942,513
	24	Pengadaan alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan)	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	3 paket	7 Paket	12.000,784			0 Paket	-	0	0	0	0	0	12.000,784
	25	Pengadaan food security kit	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	0,00	1 Paket	1.860,000			1 Paket	140,000	1 Paket	140,000	1 Paket	70,000	5 Paket	2.210,000
	00	Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang memiliki alat kesehatan lengkap	Jumlah puskesmas pembantu yang memiliki alat kesehatan lengkap	54 Pustu	0	-			58 Pustu	2.000,000	60 Pustu	2.000,000	62 Pustu	2.500,000	62 Pustu	6.500,000
	00	Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan yang dibeli	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	0,00	0	-			1 unit	3.500,000	0	-	0,000	-	1 unit	3.500,000
	00	Pengadaan Sanitarian kit	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	0,00	0	-			2 Paket	140,000	2 Paket	140,000	1 Paket	70,000	18 Paket	350,000
	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif dibagi jumlah seluruh Fasilitas Kesehatan kali 100	11 Hari	5 Hari	41,900	4 Hari	51,562	3 Hari	61,716	3 Hari	67,638	2,5 Hari	70,012	2,5 Hari	292,829
	01	Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	Jumlah pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	Jumlah pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal	1 Paket	50 sarana	10,126	50 Sarana	11,360	56 sarana	12,496	62 sarana	13,745	68 sarana	15,120	75 sarana	62,846
	02	Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	6 Kecamatan	6 Kec	31,774	6 Kec	33,323	6 Kec	41,721	6 Kec	45,893	6 Kec	45,893	6 Kec	198,603
	03	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan Ijin praktek tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan Ijin praktek tenaga kesehatan				300 orang	6,880	350 orang	7,500	375 orang	8,000	400 orang	9,000		31,380
	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh balita kali 100	70%	100%	54,395	100%	112,319	100%	327,045	100%	347,567	100%	370,030	100%	1.211,355

			Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN	Jumlah petugas kesehatan (Bidan) di bagi total bidan yang ada di kali 100%	52 Orang	74 Org		74 Org		74 Org		74 Org		74 Org		74 Org	
			Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	0	28 orang		56 org		0		28 orang		56 org		168 org	
	05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC	620 bumil dan ibu nifas	620 bumil dan ibu nifas	1.337,089	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2.108,599	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2.319,459	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2.551,405	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	2.806,545	2266 ibu hamil resti, 80 ibu bersalin, dan 9000 bayi baru lahir	11.123,097
	08	Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	148 orang	74 orang	67,881	0	0	0	0	0	0	0	0	444 orang	67,881
	11	Pelatihan APN Pelaksanaan AMP Penemuan dan pemantauan Ibu hamil risiko tinggi lintas sektor Pengadaan Bahan Penyuluhan	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih APN	52 Orang	74 Org	97,104									74 Org	97,104
	12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	0	28 orang	56,356									28 orang	56,356
	36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	Jumlah bahan penunjang medis yang ada dibagi jumlah kebutuhan bahan penunjang medis kali 100	100%	100%	9.806,366	100%	9.859,948	100%	8.985,039	100%	9.818,543	100%	10.735,397	100%	49.205,292
	01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	1 Paket	1 Paket	3.252,037	1 Paket	3.577,241	1 Paket	3.934,965	1 Paket	4.328,461	1 Paket	4.761,307	5 Paket	19.854,010
	02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	13 Puskesmas	6 Kecamatan	6.554,329	13 Puskesmas	6.282,707	13 Puskesmas	5.050,074	13 Puskesmas	5.490,082	13 Puskesmas	5.974,090	13 Puskesmas	29.351,282
	37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	Jumlah alat kesehatan dengan kondisi baik dibagi jumlah seluruh alat kesehatan yang ada kali 100	100%	100%	249,985	100%	758,492	100%	834,341	100%	917,776	100%	1.009,553	100%	3.770,147
	01	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	13 Pusk	13 Pusk	71,717	0%	0,000	0%	0,000	0	0,000	0	0,000	13 Pusk	71,717
	01	Pemeliharaan dan kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan				13Pusk	758,492	13Pusk	834,341	13 Pusk	917,776	13 Pusk	1.009,553	13 Pusk	3.520,162
	02	Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan	13 Pusk	1 Paket	178,268	0%	0,000	0%	0,000	0	0,000	0	0,000	1 Paket	178,268

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung

dr. I Gede Putra Suteja
Pembina Utama Muda
NIP : 196004071987101001